

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KEMATANGAN *E-GOVERNMENT*
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kab/ Kota di Pulau Jawa)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Izdihar Naufal 'Afaf

No. Mahasiswa: 18312183

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KEMATANGAN *E-GOVERNMENT*
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kab/ Kota di Pulau Jawa)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

UII

Oleh:

Nama: Izdihar Naufal 'Afaf

No. Mahasiswa: 18312183

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Penulis,

(Izdihar Naufal 'Afa)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KEMATANGAN *E-GOVERNMENT***

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kab/ Kota di Pulau Jawa)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

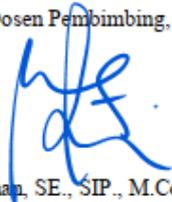
Nama: Izdihar Naufal 'Afaf

No. Mahasiswa: 18312183

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 14 Februari 2022

Dosen Pembimbing,



Siap diuji
18/02/2022

(Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEMATANGAN
E-GOVERNMENT**

Disusun oleh : IZDIHAR NAUFAL AFAF

Nomor Mahasiswa : 18312183

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 04 April 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Penguji : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas rahmat dan berkah yang diberikan oleh Allah SWT. sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di Yaumul Akhir Aamiin YaRabbal ‘Alamin. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk salah satu persyaratan kelulusan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan ucapan terima kasih kepada pihak – pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas karunia dan kenikmatan hidayahnya yang diberikan, atas hal tersebut yang tiada henti penulis ucap syukur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir penuntun umat Islam menuju ridho Allah SWT.
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Haiban Hajid dan Ibu Erni Hartawati terima kasih atas segala dukungan baik material maupun non-material sehingga penulis dapat berdiri sampai di titik sekarang ini.

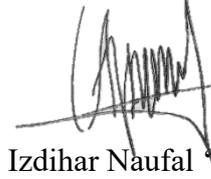
4. Dosen pembimbing penulis, Bapak Arief Rahman SE., SIP., M.Com., Ph.D. terima kasih atas gagasan, ilmu, dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Kedua saudara kandung penulis, Zalfa' Dhiaulhaq dan Fibrayir Thufail Azra atas wawasan dan bantuan yang diberikan sehingga dapat menambah pengetahuan penulis.
6. Sahabat, teman – teman, dan *partner* bimbingan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, bantuan, ilmu, dan banyak hal baik moril maupun non-moril.
7. Musisi Ariana Grande, *Boy Group* NCT, dan musisi lain yang karyanya selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi hingga akhir.

Atas ucapan terima kasih tersebut, penulis berharap semoga Allah SWT selalu memberikan kelimpahan kenikmatan kepada pihak – pihak tersebut yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, peneliti juga menerima kritik maupun saran yang dapat membantu skripsi ini menjadi lebih baik. Dari skripsi ini peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan mengenai kematangan *e-government*.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Penulis,



Izdihar Naufal Afaf



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 LANDASAN TEORI.....	9
2.1.1 Teori Agensi.....	9
2.1.2 Kematangan <i>E-Government</i>	10
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	13
2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	13
2.2.2 Kualitas Informasi.....	14
2.2.3 Kompleksitas Pemerintah.....	14
2.2.4 Luas Wilayah	15
2.2.5 Ukuran Pemerintah.....	16
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN	21
2.3.1 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kematangan <i>E-Government</i>	21
2.3.2 Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kematangan <i>E-Government</i>	22
2.3.3 Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Terhadap Kematangan <i>E-Government</i>	23
2.3.4 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Kematangan <i>E-Government</i>	25
2.3.5 Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Kematangan <i>E-government</i>	26
2.4 KERANGKA PEMIKIRAN	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 POPULASI DAN SAMPEL	29

3.2 DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL.....	30
3.2.1 Variabel Independen	30
3.2.2 Variabel Dependen.....	34
3.3 METODE PENGUMPULAN DATA.....	35
3.4 TEKNIK ANALISIS DATA	36
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	36
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.4.3 Analisis Regresi Berganda	37
3.4.4 Uji Koefisien Determinasi	38
3.4.5 Uji Hipotesis	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF.....	39
4.2 UJI ASUMSI KLASIK	42
4.2.1 Uji Normalitas	42
4.2.2 Uji Multikolinearitas	43
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	45
4.3 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA	46
4.4 UJI KOEFISIEN DETERMINASI	48
4.5 UJI HIPOTESIS	49
4.6 PEMBAHASAN	50
4.6.1 Kompetensi SDM.....	51
4.6.2 Kualitas Informasi.....	52
4.6.3 Kompleksitas Pemerintah.....	52
4.6.4 Luas Wilayah	53
4.6.5 Ukuran Pemerintah.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 SIMPULAN	55
5.2 SARAN	56
DAFTAR REFERENSI	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	40
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	43
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	46



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....	60
LAMPIRAN 2.....	63
LAMPIRAN 3.....	66
LAMPIRAN 4.....	70
LAMPIRAN 5.....	74
LAMPIRAN 6.....	78
LAMPIRAN 7.....	82



ABSTRACT

Information and communication technology (ICT) that are increasingly advanced will help human work activities, not least in the services provided by the government in the welfare of its people. The purpose of this study was to determine the effect of human resource competence, information quality, government complexity, area size, and government size on the implementation of e-government in district/ city local governments on the island of Java. This study uses multiple linear regression analysis using 224 secondary data for districts/ cities on the island of Java in 2018 to 2019. The results of this study indicate that human resource competence, information quality, area size, and government size have a positive influence on the maturity of e-government on local government districts/ cities on the island of Java. However, the complexity of the government has no effect on the maturity of e-government in district/ city local governments on the island of Java.

Keywords: HR Competency, Information Quality, Government Complexity, Area, Government Size, E-Government Maturity

ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin canggih membantu aktivitas pekerjaan manusia, tidak terkecuali dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dilakukannya penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi SDM, kualitas informasi, kompleksitas pemerintah, luas wilayah, dan ukuran pemerintah terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kab/ kota di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 224 data sekunder kab/ kota di Pulau Jawa pada tahun 2018 sampai 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM, kualitas informasi, luas wilayah, dan ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kab/ kota di Pulau Jawa. Namun untuk kompleksitas pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kab/ kota di Pulau Jawa.

Kata Kunci: Kompetensi SDM, Kualitas Informasi, Kompleksitas Pemerintah, Luas Wilayah, Ukuran Pemerintah, Kematangan *E-Government*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Semakin majunya peradaban manusia menyebabkan revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin canggih dalam pengembangannya. Pemenuhan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para pemakainya, baik masyarakat umum maupun pemerintah mendorong pemerintah untuk lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar memaksimalkan integrasi pengumpulan informasi yang dapat berguna untuk pengambilan sebuah keputusan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Penerapan *e-government* di Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa depan yang lebih kompleks, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan pertanggungjawabannya atas pelayanan publik yang memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan, serta pengindahan atas tata kelola pemerintah yang baik, transparan, terpadu, dan efektif juga efisien dalam penerapannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.

Dalam laporan JabarProv (2019), penerapan *e-government* khususnya mengenai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia sendiri sudah diterapkan mulai tahun 2003. Namun selama 15 tahun penerapannya, pada tahun 2018, kematangan *e-government* di pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masih jauh dari kata layak dan belum merata secara keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam laporan JabarProv, (2019) untuk tahun 2018 menghasilkan bahwa kematangan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ada pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia 59% nya masih jauh dari kriteria kematangan yang ditetapkan. Selain pada tingkat provinsi, kematangan *e-government* yang jauh dari kriteria juga terdapat pada pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten, dengan rinciannya untuk kota 75% belum memenuhi kriteria baik, dan untuk kabupaten 92% yang belum memenuhi kriteria baik.

Tantangan yang dihadapi pemerintah di Indonesia dalam menangani pemerataan penerapan *e-government* dapat terlihat dari interpretasi arsitektur SPBE antar tingkatan pemerintah yang menghasilkan *output* yang serupa. Tantangan lainnya adalah perbedaan pandangan dan gagasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik tersebut. Hal ini menyebabkan tidak terintegrasinya sistem informasi yang dimiliki antar instansi pemerintah. Dengan peristiwa tersebut menyebabkan informasi yang dimiliki menjadi berkurang kevaliditasannya dan terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.

Kematangan *e-government* di Indonesia dapat dilihat dalam penilaian evaluasi pada sistem pemerintah berbasis elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang divisualisasikan ke dalam bentuk nilai indeks yang

dapat menerangkan tingkat kematangan dalam penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik pada pemerintahan. Kriteria umum yang memenuhi tingkat kematangan tersebut terdiri dari: informasi satu arah (terintegrasi), interaksi yang dilakukan secara dua arah, pelayanan diberikan dengan satu kesatuan transaksi operasi, integrasi dengan layanan *e-government* lain, dan optimum dalam menyesuaikan perubahan akan kebutuhan.

Berdasarkan hasil peninjauan terhadap penelitian – penelitian terdahulu mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penerapan *e-government*, terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan yang ada dalam penelitian terdahulu tersebut. Kelemahan atau kekurangan yang ada diantaranya, penelitian Kumajas, (2021) dan Nurkholis & Anggraini, (2020) menggunakan data primer kuesioner yang dapat memungkinkan ketidakakuratan jawaban terhadap kondisi yang sebenarnya ada, yang dapat mengakibatkan bias pada data tersebut. Kemudian Nurkholis & Anggraini, (2020) pada penelitiannya, dari variabel dependen yang tidak memiliki fokus pelayanan *e-government* yang terperinci dan ukuran sampel yang belum memadai untuk mewakili jumlah responden dari jumlah penduduk di wilayah penelitiannya. Kelemahan lainnya pada penelitian yang dilakukan oleh Norris & Moon, (2005) adalah dengan penggunaan data yang tidak sesuai untuk penelitiannya, sehingga hanya beberapa variabel yang dapat digunakan untuk menggantikan variabel konseptual. Dan yang terakhir masih sedikitnya penelitian yang menggunakan kematangan *e-government* sebagai variabel dependen.

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mengembangkan penelitian– penelitian sebelumnya, dan juga mengembangkan dari kekurangan maupun kelemahan penelitian– penelitian terdahulu. Pengembangan penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui secara faktual variabel – variabel yang telah diteliti sebelumnya dengan hasil penelitian berikut yang menggunakan data sekunder dengan tujuan agar hasil penelitian yang diberikan memberikan hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa.

Penelitian ini menggunakan data – data sekunder sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Penggunaan data sekunder tersebut bertujuan untuk menghindari kelemahan yang dapat menyebabkan tidak akuratnya data yang disebabkan oleh terjadinya bias penggunaan data dari data primer berupa kuesioner seperti yang telah dilakukan pada penelitian – penelitian sebelumnya. Pengembangan lain yang dilakukan pada penelitian ini adalah pemilihan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa sebagai objek yang akan diteliti sehingga dapat menggeneralisasi hasil penelitian. Selain itu penggunaan alat ukur sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penilaiannya terdiri dari tiga aspek yaitu: penyelenggaraan pemerintahan terkait birokrasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan kemudahan layanan yang diberikan dapat lebih memfokuskan objek penelitian ini. Dan pengembangan penelitian yang terakhir adalah penambahan variabel independen yang lebih bervariasi menggunakan data yang belum pernah digunakan pada penelitian sebelumnya seperti total aset. Sehingga pada

penelitian ini dipilihlah judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kematangan *E-Government*”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa?
- b. Apakah kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa?
- c. Apakah kompleksitas pemerintah memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa?
- d. Apakah luas wilayah memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa?
- e. Apakah ukuran pemerintah memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil pemaparan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk:

- a. Menguji keterkaitan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kab/ kota di Pulau Jawa.

- b. Menguji keterkaitan antara kualitas informasi dengan kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kab/ kota di Pulau Jawa.
- c. Menguji keterkaitan antara kompleksitas pemerintah dengan kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kab/ kota di Pulau Jawa.
- d. Menguji keterkaitan antara luas wilayah dengan kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kab/ kota di Pulau Jawa.
- e. Menguji keterkaitan antara ukuran pemerintah dengan kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kab/ kota di Pulau Jawa.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pandangan ilmu dan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, kualitas informasi, kompleksitas pemerintah, dan luas wilayah terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kab/ kota di Pulau Jawa.

- b. Manfaat kebijakan

1.) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat agar dapat menambah pemahaman dan dapat memperhatikan mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kab/ kota di Pulau Jawa.

2.) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari faktor –

faktor dalam kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kab/kota di Pulau Jawa.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri dari V BAB yang akan menjelaskan skripsi secara komprehensif yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah atas latar belakang penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.
2. Bab II: Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam dasar penelitian, kumpulan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian sekarang, hipotesis penelitian sebagai asumsi penelitian, dan kerangka pemikiran sebagai gambaran arah penelitian.
3. Bab III: Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan mengenai populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel pada penelitian, metode pengumpulan data yang dilakukan, dan teknik analisis data yang akan digunakan.
4. Bab VI: Data dan Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan mengenai pengujian data yang akan di analisis, pengujian tersebut adalah uji analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear

berganda, uji koefisien determinasi, uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

5. Bab V: Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan penjelasan mengenai saran yang dapat digunakan oleh penelitian di masa mendatang maupun untuk pemerintah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling, (1976), teori agensi merupakan hubungan komitmen antara sekelompok prinsipal yang mengandalkan pemberian pelayanan jasa yang disediakan oleh agen dengan cara menyerahkan pengambilan keputusan kepada agen tersebut yang manfaatnya dapat diberikan untuk kesejahteraan para prinsipal.

Berdasarkan teori agensi, entitas sektor publik atau pemerintah memiliki peran untuk menjadi agen dan masyarakat berperan sebagai prinsipal, dimana masyarakat menyerahkan tanggung jawab atas pengambilan keputusan kepada pemerintah. Dengan pelimpahan kekuasaan tersebut masyarakat berharap kepada pemerintah agar mengelola sumber daya yang dimiliki dapat dilakukan dengan baik dan benar agar mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan. Penjelasan tersebut sejalan dengan analogi yang diberikan oleh Banker & Patton, (1987) yaitu konstituen sebagai prinsipal dan manajer sektor publik sebagai agen. Dari hal tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga tingkat kematangan *e-government* yang berkualitas sangatlah penting untuk diwujudkan.

Dengan adanya teori agensi diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman dan solusi dari permasalahan mengenai kualitas kematangan *e-government* di pemerintahan Indonesia. Perbedaan kepentingan untuk memperkaya diri antara agen dengan prinsipal dapat berpengaruh terhadap kualitas dari kematangan *e-government* itu sendiri.

2.1.2 Kematangan *E-Government*

Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional, bahwa dalam seluruh entitas sektor publik di Indonesia diamanatkan untuk mulai menerapkan sistem *e-government* sebagai media pelayanan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah untuk kemudahan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak – pihak terkait lainnya. Layanan yang dimaksud dalam peraturan tersebut diantaranya meliputi hubungan antara pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan bisnis (G2B), dan pemerintah dengan masyarakat (G2C).

Tingkat kematangan *e-government* dalam hal pelayanan publik memiliki asas – asas yang harus terpenuhi dalam pengimplementasiannya. Asas – asas yang dimaksud tersebut terdapat dalam Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang ada dalam Asas Undang – Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, diantaranya: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Menurut Epstein, (2022) pemerintah daerah perlu untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, dengan dorongan tersebut maka pemerintah daerah mulai menerapkan *e-government* sebagai inovasi pelayanan kepada masyarakat sebagai solusi yang diberikan. *E-government* sendiri merupakan inovasi layanan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola pelayanan dan informasi yang diberikan pemerintah. Namun dalam praktiknya yang sudah berjalan hampir dua dekade ini, pemerintah daerah masih menemukan hambatan – hambatan yang dapat menghalangi jalannya proses inovasi menggunakan *e-government* untuk mencapai tujuannya.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Weerakkody et al., (2012) mengenai perbandingan penggunaan *e-government* pada pemerintahan dengan ekonomi maju dengan pemerintahan dengan ekonomi transisi, menyebutkan bahwa dalam penggunaan *e-government* fokus utama yang dilakukan kedua pemerintahan tersebut adalah untuk mengembangkan pembangunan layanan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan digunakannya teknologi informasi dan komunikasi yang canggih.

Menurut Layne & Lee, (2001), penerapan *e-government* sendiri berfokus pada pengembangan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam artikelnya mengungkapkan bahwa untuk dapat menerapkan *e-government*, pemerintah perlu melalui empat tahapan agar dapat mencapai kematangan dari *e-government* itu sendiri. Keempat tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Katalogisasi, merupakan tahap permulaan pemerintah dalam menerapkan layanan *e-government* berupa situs web yang dapat menyediakan informasi mengenai pelayanan jasa yang dibutuhkan pada tahap yang paling sederhana.
2. Transaksi, merupakan tahap kedua berupa pengembangan layanan *e-government* yang lebih interaktif antara pemerintah dengan masyarakat yang diwujudkan dengan adanya transaksi elektronik menjadikannya sebagai revolusioner dalam pelayanan yang diberikan pemerintah.
3. Interaksi vertikal, pada tahap ketiga ini pelayanan *e-government* yang diberikan akan dapat terhubung antar pemerintah di tingkatan yang berbeda, sehingga antar tingkat pemerintah memiliki informasi yang sama dan mengefisiensikan pelayanan tersebut.
4. Interaksi horizontal, pada tahapan terakhir ini pelayanan *e-government* pemerintah akan terhubung antar unit pelayanan fungsional yang lain, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang ada secara efektif dan antar unit pelayanan fungsional mendapatkan informasi dengan efisien.

Dari keempat tahapan model tersebut, Andersen & Henriksen, (2006) mereorientasikan model tersebut dengan menggunakan Model *Public Sector Process Rebuilding* (PPR) yang bertujuan agar *e-government* tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi saja, namun juga bertujuan untuk mendapatkan manfaat bagi para pengguna. Model PPR sendiri memiliki empat tingkatan yang diantaranya:

1. Penanaman, pada tahap ini berfokus melindungi tahapan integrasi baik vertikal maupun horizontal, selain itu pada tahap ini masih ditemukannya keterbatasan akan pelayanan *front-end*. Hal tersebut dapat membuat ketidakjelasan tujuan diterapkannya *e-government*.
2. Ekstensi, pada tahap ini pengembangan sudah dilakukan dengan mengadopsi situs web yang interaktif antara pemerintah dengan masyarakat. Namun pada tahap ini proses yang dilakukan masih banyak dilakukan secara manual.
3. Kedewasaan, tahap ketiga ini penerapan yang dilakukan lebih matang, dikarenakan pada tahap ini fokus utamanya adalah pengembangan teknologi yang memberikan lebih banyak manfaat bagi para pengguna seperti transparansi dan juga bukan hanya interaksi semata, namun layanan proses permintaan masyarakat.
4. Revolusioner, pada tahap terakhir ini kematangan ditandai dengan pergerakan data informasi antar organisasi lain, dengan kemudahan tersebut dapat melacak segala informasi yang ada dan data informasi dapat terintegrasi sehingga proses dapat dilakukan secara efektif.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Penelitian yang dilakukan oleh Kumajas, (2021) menghasilkan bahwa kompetensi atau kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kematangan *e-government*, hasil tersebut didukung oleh penelitian dari Probowulan, (2016), bahwa kompetensi sumber daya manusia

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kematangan *e-government*. Penelitian lain oleh Krishnan et al., (2017) menyatakan bahwa dalam penelitiannya modal manusia memiliki hubungan positif terhadap kegiatan implementasi *e-government* yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu, (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor dari 55 faktor kesuksesan kegiatan implementasi *e-government* adalah kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri.

2.2.2 Kualitas Informasi

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis & Anggraini, (2020) menghasilkan bahwa kualitas informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government*, hasil tersebut didukung oleh penelitian dari Oktaviani & Indra Arza, (2020) dan Yustikasari, (2018) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government*. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian dari Napitupulu, (2014), bahwa dalam artikelnya beberapa faktor kesuksesan pengimplementasian *e-government* sendiri salah satunya adalah kualitas dari informasi yang dimiliki oleh pemerintahan tersebut.

2.2.3 Kompleksitas Pemerintah

Penelitian yang dilakukan oleh Yustikasari, (2018) menghasilkan bahwa kompleksitas pemerintah memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta & Sofyani, (2021) dengan hasil bahwa kompleksitas

pemerintah atau jumlah penduduk tidak memiliki hubungan dengan kematangan *e-government*. Penelitian dari Muflihah & Susanto, (2017) menyatakan bahwa populasi dari suatu wilayah akan mempengaruhi implementasi dari *e-government* dikarenakan proses administrasi yang terjadi menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu, (2014) menyatakan bahwa dari 55 faktor yang mempengaruhi implementasi *e-government* salah satu faktor yang ditemukan diantaranya adalah keterlibatan pengguna yang menggunakan pelayanan jasa implementasi dari *e-government*, yang berarti bahwa populasi dari suatu wilayah pemerintahan mempengaruhi implementasi dari *e-government* tersebut.

2.2.4 Luas Wilayah

Penelitian yang dilakukan oleh Moon, (2002) menghasilkan bahwa luas wilayah memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta & Sofyani, (2021) menghasilkan bahwa luas wilayah atau area tidak memiliki hubungan dengan kematangan *e-government*. Penelitian dari Muflihah & Susanto, (2017) menyatakan bahwa karakteristik wilayah pemerintahan memiliki pengaruh dalam implementasi *e-government*, dengan demikian luas suatu wilayah memiliki hubungan dalam kematangan *e-government*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu, (2014) luas suatu wilayah pemerintahan menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi *e-government* dalam hal meliputi perencanaan, pertimbangan praktik, strategi sumber daya, struktur organisasi, dan tata kelola pemerintahan terkait.

2.2.5 Ukuran Pemerintah

Penelitian yang dilakukan oleh Norris & Moon, (2005) menghasilkan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Glyptis et al., (2020) ukuran pemerintah yang ada pada penelitian ini diwakilkan oleh posisi keuangan suatu pemerintah memiliki pengaruh terhadap kegiatan implementasi *e-government*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu, (2014) pendanaan yang cukup, biaya penggunaan, dan pendapatan mandiri dengan manajemen proyek yang baik maka akan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dari *e-government* itu sendiri. Dari penelitian Glyptis et al., (2020) menyatakan bahwa posisi keuangan suatu pemerintahan merupakan faktor penting yang memiliki pengaruh terhadap implementasi dari *e-government*. Liang et al., (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa biaya dapat mempengaruhi proses implementasi dari *e-government*, dengan kata lain bahwa kekayaan pemerintah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dari *e-government* itu sendiri.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Norris & Moon, (2005)	Orientasi Inovasi Manajerial dan Ukuran Pemerintah	Analisis Regresi Berganda	Orientasi inovasi manajerial dan ukuran pemerintah memiliki penentu pengaruh yang paling menarik untuk penerapan <i>e-government</i> .

2.	Moon, (2002)	Ukuran Kota dan Manajer Dewan Pemerintah	Analisis Regresi Berganda	Hasil analisis regresi berganda menyatakan bahwa ukuran kota dan manajer dewan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap penerapan <i>e-government</i> pada survei <i>e-government</i> .
3.	Kumajas, (2021)	Kualitas SDM, Infrastruktur, Kepemimpinan, dan Komunikasi	Analisis Regresi Berganda	Hasil analisis regresi berganda menyatakan bahwa kualitas SDM, dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>e-government</i> . Sedangkan untuk infrastruktur dan kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>e-government</i> .
4.	Nurkholis & Anggraini, (2020)	Niat masyarakat, Kualitas sistem, Kemudahan pengguna, dan Kualitas informasi	Analisis <i>Structural Equation Modelling</i>	Niat masyarakat berpengaruh terhadap penerapan <i>e-government</i> . Sedangkan untuk kualitas sistem, kemudahan penggunaan, dan kualitas

				informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>e-government</i> .
5.	Yustikasari, (2018)	Kualitas laporan keuangan, kompleksitas pemerintah, dan Tingkat kesejahteraan masyarakat	Analisis Regresi Berganda	Kualitas laporan keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>e-government</i> . Sedangkan untuk kompleksitas pemerintah memiliki pengaruh terhadap penerapan <i>e-government</i> .
6.	Nur, (2014)	Sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana, dan Infrastruktur	Analisis Deskriptif Kualitatif	Pemerintah daerah sudah menerapkan <i>e-government</i> , namun dalam kematangannya kurang baik.
7.	Krishnan et al., (2017)	Infrastruktur TIK, Modal Manusia, dan Tata Kelola	Analisis <i>Cross-Sectional</i>	Infrastruktur TIK dan modal manusia memiliki pengaruh positif terhadap kemauan pemerintah dalam implementasi dan kematangan <i>e-government</i> . Sementara itu untuk tata kelola tidak memiliki

				pengaruh yang signifikan terhadap kemauan pemerintah dalam implementasi dan kematangan <i>e-government</i> .
8.	Glyptis et al., (2020)	Faktor Ekonomi, Faktor Teknis, Faktor Sosial dan Budaya, dan Strategi Hukum dan Politik	Analisis Reduksi Data dan Analisis Tampilan Data	Posisi keuangan, tingkat kesiapan elektronik, fasilitas infrastruktur, kerangka politik dan hukum, organisasi dan kelembagaan, dan karakteristik sosial budaya memiliki pengaruh terhadap implementasi <i>e-government</i> .
9.	Mikalef et al., (2021)	Konteks Teknologi (Manfaat Teknologi), Konteks Organisasi (Biaya Keuangan, Inovasi Organisasi), Konteks Lingkungan (Tekanan Pemerintah, Tekanan Warga, Insentif Pemerintah, dan Dukungan Regulasi)	Analisis Pemodelan Persamaan Struktural Berbasis Kuadrat Terkecil Parsial	Biaya keuangan, inovasi organisasi, tekanan pemerintah, insentif pemerintah, dan dukungan regulasi memiliki pengaruh terhadap pengembangan <i>Artificial Intelligence</i> . Namun untuk manfaat teknologi dan tekanan warga tidak memiliki pengaruh

				terhadap pengembangan <i>Artificial Intelligence</i> .
10.	Liang et al., (2017)	Penggerak Teknologi, Dukungan Penyedia <i>Cloud</i> , Stimulus Lingkungan, Kesiapan Organisasi, dan Kepercayaan <i>Cloud</i>	Analisis Pengkodean Terbuka, Pengkodean Aksial, dan Pengkodean Selektif	Faktor utama penggerak teknologi, dukungan penyedia <i>cloud</i> , stimulus lingkungan, kesiapan organisasi, dan kepercayaan <i>cloud</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan <i>e-government</i> . Selain itu kepercayaan <i>cloud</i> memeditasi variabel penggerak teknologi dan dukungan penyedia <i>cloud</i> dengan penerapan <i>e-government</i> . Untuk stimulus lingkungan dan kesiapan organisasi memeditasi variabel kepercayaan <i>cloud</i> dengan penerapan <i>e-government</i> .

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kematangan *E-Government*

Manusia sebagai pelaku utama dalam menciptakan sebuah hubungan komitmen yang dilakukan oleh prinsipal dan agen. Masyarakat yang berperan sebagai prinsipal yang menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada para pegawai pemerintah berperan sebagai agen dalam pengambilan keputusan yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dalam kematangan *e-government* diharuskan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuninya. Dalam pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu memperhatikan latar belakang SDM yang dipilih untuk usaha pencegahan dalam hal negatif mengenai praktik dalam meningkatkan kematangan *e-government*, dan diharapkan dengan kematangan *e-government* yang dikelola dengan baik oleh SDM yang tepat, maka akan menghasilkan pelayanan jasa dan informasi yang berkualitas yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam memperoleh pelayanan pemerintah yang baik.

Menurut Kumajas (2021), dalam kesuksesan dijalankannya sebuah organisasi terdapat sumber daya manusia yang berperan penting dalam menjalankannya, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitiannya bahwa SDM berpengaruh signifikan terhadap kematangan *e-government*. Dalam konteks penelitian ini, dengan tujuan pemerintah dalam memberikan pelayan yang

berkualitas dalam usaha meningkatkan kematangan *e-government* maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sehingga dapat mencapai tujuan pemerintah.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara kompetensi SDM dengan kematangan *e-government*. Dengan dimanfaatkannya SDM yang kompeten dalam bidangnya maka akan memberikan pengaruh terhadap kematangan *e-government*, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap kematangan e-government

2.3.2 Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kematangan E-Government

Informasi sebagai salah satu *output* yang wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah sebagai agen dalam mengelola segala aktivitasnya haruslah memiliki kualitas yang baik agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai prinsipal. Selain itu, dengan kualitas informasi yang baik maka akan meningkatkan kepastian pengambilan keputusan yang akan berdampak pada pencapaian manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Informasi yang dimiliki pemerintah menjadi instrumen penting dalam memberikan pelayanan jasa kepada para pemangku kepentingan dalam hal bertindak mengambil langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan informasi yang sesuai dengan fakta yang ada dan informasi tersebut dapat

dipertanggungjawabkan oleh pemerintah akan kebenarannya, maka pelayanan jasa yang diberikan pun akan maksimal dan dapat mencapai target pemenuhan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan kematangan *e-government* itu sendiri. Dari informasi berkualitas tersebut maka ada sistem informasi serta teknologi informasi dan komunikasi yang canggih yang digunakan.

Menurut Nurkholis & Anggraini, (2020), kualitas informasi yang baik dari pemerintah akan dapat mempengaruhi peningkatan penggunaan pelayanan *e-government* yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, menurut Yustikasari (2018), kinerja manajemen berpengaruh terhadap kualitas informasi yang ada dalam pembuatan laporan keuangan, dimana laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada para pemangku kepentingan yang ada melalui situs web pemerintah sebagai penerapan *e-government*.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara kualitas informasi dengan kematangan *e-government*. Dengan informasi yang berkualitas maka akan memberikan pengaruh terhadap kematangan *e-government*, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2: Kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap kematangan e-government

2.3.3 Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Terhadap Kematangan E-Government

Populasi yang majemuk di suatu pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses administrasi yang akan berlangsung dalam kegiatan

penyerahan pertanggungjawaban antara prinsipal dengan agen. Dengan berbagai macam populasi yang ada menyebabkan berbagai permasalahan, sehingga mempengaruhi dalam mencapai nilai manfaat untuk kesejahteraan berbagai macam sektor masyarakat tersebut.

Jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah pemerintahan menyebabkan kompleksitas pelayanan jasa dan informasi yang diperlukan oleh pemerintah. Semakin banyak jumlah penduduknya maka semakin banyak juga pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kebutuhan masyarakat yang banyak, maka pemerintah harus lebih fokus dalam menerapkan *e-government* agar memudahkan jalannya pemerintahan di masa digital ini.

Menurut Yustikasari, (2018) berdasarkan teori agensi bahwa masyarakat sebagai prinsipal paling dominan daripada agen yaitu pemerintah, berhak atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara penuh untuk mendapatkan informasi dan pelayanan. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara kompleksitas pemerintah dengan kematangan *e-government*. Dengan kompleksnya suatu penduduk di suatu wilayah maka semakin banyak juga pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3: Kompleksitas Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kematangan e-government

2.3.4 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Kematangan *E-Government*

Luas wilayah suatu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya yang beraneka ragam menyebabkan pelimpahan kekuasaan oleh masyarakat sebagai prinsipal dalam pengambilan keputusan pengelolaan. Tanggung jawab tersebut diserahkan kepada pemerintahan sebagai agen, dimana agen akan bertanggung jawab penuh akan pengambilan keputusan yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas menerapkan sistem desentralisasi dan memberikan tanggung jawab pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, dari luas wilayah yang beragam mengakibatkan pelayanan pemerintah yang diberikan suatu wilayah juga beragam. Semakin luas suatu wilayah pemerintahan maka pemenuhan akan kebutuhan masyarakatnya untuk kesejahteraan juga bertambah banyak, terutama dalam memberikan pelayanan jasa.

Menurut Moon (2002) luas wilayah memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government* dari penelitian sebelumnya organisasi yang lebih besar memiliki instrumen yang lebih maju daripada organisasi yang lebih kecil. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara luas wilayah dengan kematangan *e-government*. Dengan luasnya wilayah suatu pemerintahan maka kebutuhan akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah juga akan mempengaruhi kematangan *e-government*. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H4: Luas Wilayah memiliki pengaruh positif terhadap kematangan e-government

2.3.5 Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Kematangan *E-government*

Ukuran pemerintah sebagai penggambaran bentuk suatu daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya dalam memberikan pelayanan jasa kepada para prinsipal. Pemerintah sebagai agen dalam hal ini memiliki kewajiban untuk mengelola dengan maksimal sumber daya yang dimiliki baik besar maupun kecilnya ukuran pemerintahan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan dan penerapan *e-government*.

Semakin besarnya ukuran pemerintah yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah salah satunya menandakan besar kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut, dengan begitu dalam melakukan pemenuhan akan kebutuhan pelayanan jasa kepada para pemangku kepentingan akan semakin kompleks untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan sumber daya tersebut pemerintah daerah dapat menjalankan sistem pemerintahan yang lebih maju dengan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam mensejahterakan masyarakat.

Menurut Norris & Moon, (2005) sumber daya yang dimiliki oleh suatu pemerintahan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah tersebut dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan yang diberikan untuk masyarakatnya. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara ukuran

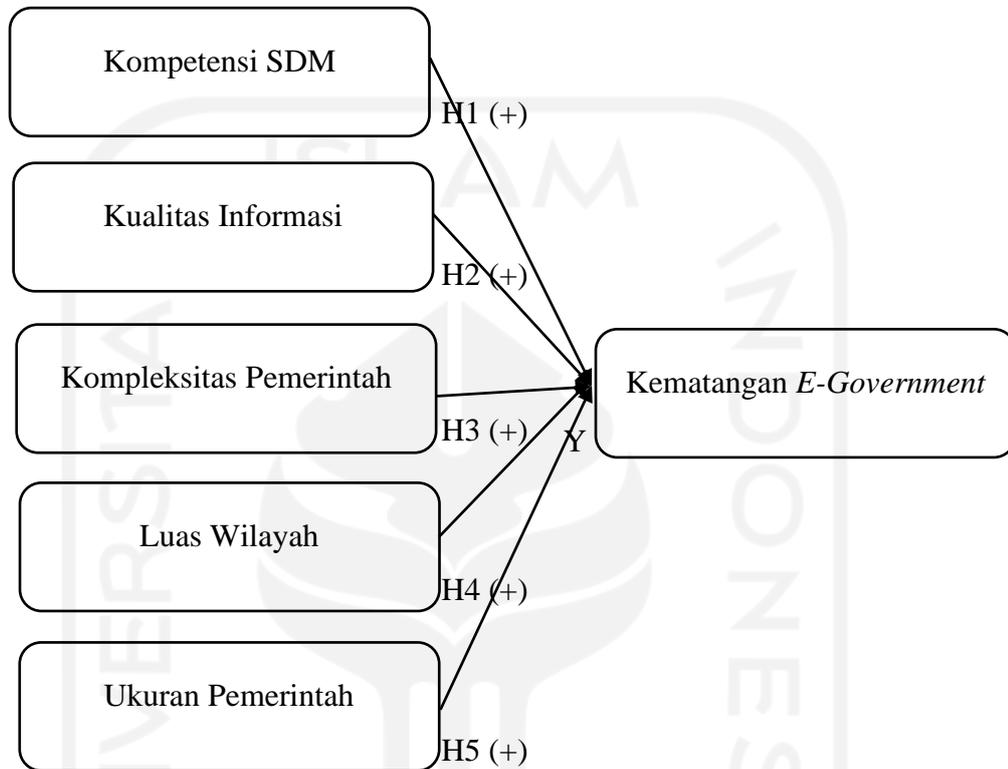
pemerintah dengan kematangan *e-government*. Dengan ukuran pemerintah yang lebih besar pada suatu pemerintah daerah maka pemenuhan dalam kebutuhan untuk menerapkan *e-government* dapat diatasi dengan lebih baik sehingga ukuran pemerintah dapat mempengaruhi kematangan *e-government*.

Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H5: Ukuran Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kematangan e-government



2.4 KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa. Unit analisis yang digunakan adalah data sekunder yang terdapat pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa dengan rentang tahun antara 2018 – 2019. Dikarenakan pada tahun 2020 tengah terjadi pandemi *covid-19*, hal tersebut menyebabkan terhambatnya proses audit yang dilakukan oleh BPK, sehingga peneliti belum bisa mendapatkan hasil audit laporan keuangan pada tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria data pemerintah daerah kabupaten/ kota yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memiliki data nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dari Kemenpan RB.
2. Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memiliki data nilai indeks pembangunan manusia.
3. Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memiliki data hasil opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memiliki data jumlah penduduk pada wilayah tersebut.
5. Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memiliki data luas wilayah pada wilayah tersebut.
6. Pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang memiliki data total aset pada wilayah tersebut.

3.2 DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

3.2.1 Variabel Independen

Dalam penelitian ini akan digunakan lima variabel independen, diantaranya adalah: kompetensi SDM, kualitas informasi, kompleksitas pemerintah, luas wilayah, dan ukuran pemerintah. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Muflihah & Susanto (2017), karakteristik pemerintah daerah dapat diwakilkan dengan kompetensi SDM sebagai kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan penggunaan *e-government*. Kualitas informasi sebagai karakteristik manajerial suatu pemerintahan dengan proses manajerial penyampaian informasi pemerintah dalam melakukan pelayanan *e-government*. Kompleksitas pemerintah, luas wilayah, dan ukuran pemerintah sebagai karakteristik yang menggambarkan mengenai kondisi administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mewakili populasi, wilayah, dan bentuk pemerintahan tersebut.

3.2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, kompetensi SDM pada lingkup pemerintah merupakan keahlian dalam diri individu yang terdiri

dari wawasan, keterampilan, dan sifat cepat tanggap dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sehingga dengan kompetensi tersebut diharapkan SDM dapat bekerja lebih maksimal dalam melakukan pekerjaannya.

Kompetensi SDM dengan menggunakan alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai data yang digunakan didapatkan melalui situs web Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam IPM memiliki tiga kriteria yang harus terpenuhi di dalamnya, yaitu melalui ukuran dari perbandingan angka harapan hidup, kemampuan membaca dan menulis, dan standar hidup manusia. Di dalam IPM sendiri dijelaskan mengenai bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakan akses pembangunan dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

3.2.1.2 Kualitas Informasi

Kualitas informasi menurut Jogiyanto, (2017) merupakan ukuran yang menitikberatkan pada hasil atau *output* yang diproduksi oleh suatu sistem informasi yang terdiri dari keakuratan, ketepatanwaktuan dan masuk akal. Informasi yang disajikan oleh pemerintah haruslah memiliki kualitas sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat, maka untuk memenuhi hasil informasi yang berkualitas perlu tinjauan dari pihak ketiga yang netral.

Kualitas informasi dengan menggunakan alat ukur opini audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK sebagai data yang digunakan. Dalam pelaporan keuangan sebuah entitas, untuk menghasilkan informasi yang

berkualitas maka perlu untuk memenuhi empat komponen yang diantaranya adalah dapat dipahami, masuk akal, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan.

Pada penelitian berikut data akan diproksikan ke dalam angka sebagaimana untuk hasil audit adalah sebagai berikut:

1. Wajar Tanpa Pengecualian = 4
2. Wajar Dengan Pengecualian = 3
3. Tidak Menyatakan Pendapat = 2
4. Tidak Wajar = 1

3.2.1.3 Kompleksitas Pemerintah

Kompleksitas pemerintah yang diproksikan ke dalam jumlah penduduk, penduduk sendiri dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 adalah warga atau masyarakat yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah tertentu. Kompleksitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kondisi yang rumit, kompleksitas pemerintah sendiri dapat diartikan sebagai kondisi kerumitan dalam suatu wilayah pemerintahan dimana fokus pada penelitian ini adalah pada jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Kompleksitas pemerintah dengan menggunakan alat ukur log natural jumlah penduduk sebagai data yang digunakan didapatkan melalui situs web Badan Pusat Statistik (BPS). Negara Indonesia dengan tingkat kelahiran yang tinggi menyebabkan angka jumlah penduduk di tiap tahunnya selalu bertambah. Selain itu tingkat kematian juga mempengaruhi jumlah penduduk setiap tahunnya. Dengan berkembangnya penduduk yang semakin berkualitas,

mendorong pemerintah untuk selalu memiliki sumber daya yang kompeten untuk mengembangkan pelayanan *e-government* yang berkualitas kepada masyarakat. Penduduk yang berkualitas tersebut menyebabkan tuntutan akan pelayanan *e-government* yang diberikan semakin tinggi, tidak terkecuali melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *e-government*.

3.2.1.4 Luas Wilayah

Dalam Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang, wilayah merupakan area geografis yang memiliki kesatuan dengan batas dan sistem, yang penentuan area tersebut didasarkan pada bagian administratif maupun fungsional. Sehingga dari penjelasan tersebut antar daerah pemerintahan memiliki batas wilayah masing – masing yang dapat berupa batas fisik seperti sungai ataupun jalan maupun batas non-fisik.

Luas wilayah dengan menggunakan alat ukur luas wilayah sebagai data yang digunakan didapatkan melalui situs web Badan Pusat Statistik (BPS). Wilayah yang semakin luas memberikan dorongan kepada pemerintahannya untuk menyediakan jasa pelayanan publik yang lebih kompleks, dikarenakan semakin luasnya wilayah maka semakin beragam juga permasalahan yang ada dalam pemerintahan tersebut. Dengan beragamnya luas wilayah di Indonesia menyebabkan kebutuhan akan pelayanan fasilitas publik di berbagai daerah berbeda pula.

3.2.1.5 Ukuran Pemerintah

Menurut Damanpour (1991), yang dimaksud dengan ukuran pemerintah adalah bentuk penggambaran suatu pemerintahan, yang dikategorikan menjadi besar ataupun kecilnya suatu pemerintahan tersebut. Penentuan kategori tersebut dapat ditentukan dengan melihat dari karyawan yang dipekerjakan dalam pemerintahan tersebut, total aset yang dimiliki pemerintahan tersebut, total pendapatan dari aktivitas yang telah dilakukan pemerintahan tersebut, ataupun dari tingkat produktivitas dalam pemerintahan tersebut. Ukuran pemerintah sendiri dalam penelitian ini diprosikan ke dalam bentuk total aset yang kemudian dilakukan log natural pada data total aset tersebut.

Ukuran pemerintah dengan menggunakan alat ukur log natural total aset sebagai data yang digunakan didapatkan melalui laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-pulau Jawa. Dalam total aset memiliki beberapa komponen di dalamnya berupa: aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud, investasi, dan aset lain – lain. Total aset dapat ditemukan di dalam neraca atau laporan keuangan pemerintahan.

3.2.2 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini akan menggunakan variabel dependen berupa kematangan *e-government*.

3.2.2.1 Kematangan *E-Government*

E-government atau pemerintahan elektronik menurut World Bank (2015), adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dilakukan oleh suatu pemerintahan, dimana pemanfaatan tersebut memiliki fungsi untuk

dapat meningkatkan kemampuan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, institusi bisnis, dan ataupun antar pemerintahan lainnya. Kematangan sendiri menurut Andersen & Henriksen, (2006) merupakan istilah yang dipakai dalam mengkategorikan keadaan pada kegiatan yang memiliki keberlanjutan. Sehingga kematangan *e-government* merupakan pengkategorian keadaan pada kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh suatu pemerintahan, dan diharapkan memiliki fungsi untuk dapat meningkatkan kemampuan pelayanan secara berkelanjutan.

Kematangan *e-government* dengan menggunakan alat ukur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai data yang akan digunakan. Di dalam SPBE sendiri memberikan pelayanan berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan pelayanan yang diberikan pemerintah yang memiliki kualitas tinggi dan terintegrasi dengan baik maka akan dapat menyediakan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel untuk masyarakatnya.

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara memanfaatkan data sekunder yang terdapat pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), laporan keuangan pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan rentang waktu tahun 2018 sampai 2019.

Pada pengumpulan data penelitian kematangan *e-government* dengan alat ukurnya adalah evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pengumpulan data untuk kompetensi SDM dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didapatkan dari situs web BPS. Pengumpulan data untuk kualitas informasi dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang berupa opini audit mengenai laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Pengumpulan data untuk kompleksitas pemerintah dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang berupa jumlah penduduk pada masing – masing kabupaten/ kota yang didapatkan dari situs web BPS. Pengumpulan data untuk luas wilayah dilakukan dengan luas wilayah masing – masing kabupaten/ kota yang ada di Pulau Jawa yang didapatkan dari situs web BPS. Dan yang terakhir pengumpulan data untuk ukuran pemerintah dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang berupa total aset masing – masing kabupaten/ kota yang ada di Pulau Jawa yang didapatkan melalui laporan keuangan pemerintah daerah.

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali, (2016) analisis statistik deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan pendistribusian data penelitian berdasarkan rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari data yang akan digunakan untuk diolah.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai persyaratan statistik dalam menggunakan metode analisis regresi berganda. Dengan menggunakan uji asumsi klasik, persamaan regresi tersebut dapat menghasilkan ketepatan, konsistensi, dan kejelasan atas pengolahan data yang dilakukan.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengukur dalam hal pendistribusian data apakah data yang akan diolah terdistribusi secara normal atau tidak normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengukur data yang akan diolah dalam hal adanya hubungan antar variabel independen dari model regresi yang berkualitas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengukur adanya perbedaan variansi dari residual antara pengamatan yang lain dari model regresi yang berkualitas.

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dalam pengujian kualitas dari hipotesis yang diperuntukkan untuk metode multiple regresi sebagai alat ukur yang dapat mengetahui pengaruh atau hubungan dari antar variabel.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \epsilon_0$$

Keterangan:

Y = Kematangan *E-Government*

α = Persamaan Regresi

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Variabel Independen

X_1 = Kompetensi SDM

X_2 = Kualitas Informasi

X_3 = Kompleksitas Pemerintah

X_4 = Luas Wilayah

X_5 = Ukuran Pemerintah

ϵ_0 = Error

3.4.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model penelitian dalam menjelaskan pengaruh dari variabel – variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen, yang hasilnya dapat dilihat pada nilai *adjusted R Square*.

3.4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis atau uji T digunakan untuk mengukur pengaruh dari masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi SDM, kualitas informasi, kompleksitas pemerintah, luas wilayah dan ukuran pemerintah terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa. Pada bab IV berikut ini akan menjelaskan mengenai perhitungan dan hasil penelitian dari faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kematangan *e-government* pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik *purposive sampling*, dari 226 data hanya kabupaten Banjar yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak terdapat data SPBE pada tahun 2018, sehingga menghasilkan 224 data, dimana variabel dependen yaitu kematangan *e-government* menggunakan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kabupaten/ kota di Pulau Jawa pada tahun 2018 – 2019.

4.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Pada penelitian berikut ini variabel independen yang digunakan adalah kompetensi SDM, kualitas informasi, kompleksitas pemerintah, luas wilayah, dan ukuran pemerintah. Untuk variabel dependen yang digunakan adalah berupa kematangan *e-government*. Setelah dilakukannya pengujian secara statistik deskriptif, hasil analisis tersebut terdapat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Jangkauan	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata - Rata	Deviasi Standar
Kompetensi SDM	25,65	61,00	86,65	71,89	5,18
Kualitas Informasi	3,00	1,00	4,00	3,95	0,27
Kompleksitas Pemerintah	3,49	11,77	15,26	13,79	0,70
Luas Wilayah	14878,94	16,06	14895,00	1592,59	2466,50
Ukuran Pemerintah	3,28	14,34	17,62	15,29	0,62
Kematangan <i>E-Government</i>	2,48	1,28	3,76	2,58	0,55

Sumber: Data Sekunder, diolah

Berdasarkan uji analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 tersebut, interpretasi yang dapat ditarik menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang pertama pada penelitian ini adalah kompetensi SDM menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai alat ukur. Dari uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 tersebut dengan 224 data yang digunakan pada tahun 2018 – 2019, jangkauan statistiknya bernilai 25,65 dengan nilai minimumnya 61,00 adalah Kabupaten Sampang dan nilai maksimumnya 86,65 adalah Kota Yogyakarta. Untuk rata – rata datanya bernilai 71,89. Standar deviasi sebesar 5,18.
2. Variabel independen yang kedua pada penelitian ini adalah kualitas informasi menggunakan hasil opini atas audit laporan keuangan oleh BPK sebagai alat ukur. Data opini tersebut diubah menjadi data berbentuk skala ordinal dari 1 sampai 4. Dari uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 tersebut dengan 224 data yang digunakan pada tahun 2018 – 2019, jangkauan statistiknya bernilai 3 dengan nilai minimumnya adalah 1 adalah

Kabupaten Jember pada tahun 2019 dan nilai maksimumnya adalah 4. Untuk rata – rata datanya bernilai 3,95. Standar deviasi sebesar 0,27.

3. Variabel independen yang ketiga pada penelitian ini adalah kompleksitas pemerintah menggunakan log natural jumlah penduduk sebagai alat ukur. Dari uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 tersebut dengan 224 data yang digunakan pada tahun 2018 – 2019, jangkauan statistiknya bernilai 3,49 dengan nilai minimumnya adalah 11,77 adalah Kota Magelang dan nilai maksimumnya 15,26 adalah Kabupaten Bogor. Untuk rata – rata datanya bernilai 13,79. Standar deviasi sebesar 0,70.
4. Variabel independen yang keempat pada penelitian ini adalah luas wilayah menggunakan satuan luas wilayah sebagai alat ukur. Dari uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 tersebut dengan 224 data yang digunakan pada tahun 2018 – 2019, jangkauan statistiknya bernilai 14.878,94 dengan nilai minimumnya 16,06 adalah Kota Magelang dan nilai maksimumnya 14.895,00 adalah Kabupaten Semarang. Untuk rata – rata datanya 1.592,59. Standar deviasi sebesar 2.466,50.
5. Variabel independen yang kelima pada penelitian ini adalah ukuran pemda menggunakan log natural total aset sebagai alat ukur. Dari uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 tersebut dengan 224 data yang digunakan pada tahun 2018 – 2019, jangkauan statistik 3,28 dengan nilai minimumnya 14,34 adalah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 dan nilai maksimumnya 17,62 adalah Kota Surabaya pada tahun 2019. Untuk rata – rata datanya 15,29. Standar deviasi sebesar 0,62.

6. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kematangan *e-government* menggunakan alat ukur sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai alat ukur. Dari uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 tersebut dengan 224 data yang digunakan pada tahun 2018 – 2019, jangkauan statistik 2,48 dengan nilai minimumnya 1,28 adalah Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 dan nilai maksimumnya 3,76 adalah Kabupaten Kendal pada tahun 2019. Untuk rata – rata datanya 2,58. Standar deviasi sebesar 0,55.

4.2 UJI ASUMSI KLASIK

Untuk dapat menggunakan analisis regresi linear berganda, maka data yang akan digunakan perlu untuk memenuhi persyaratan statistik dengan menggunakan uji asumsi klasik, diantaranya adalah uji: normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedasitas. Tujuan dilakukannya uji asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian hasil bahwa hasil yang diberikan tepat, konsisten, dan tidak terjadi bias.

4.2.1 Uji Normalitas

Tujuan dari dilakukannya uji normalitas adalah untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak normal. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal, namun jika nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka nilai residual berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N Normal Parameters ^{a,b}		224
	Mean	0,000
	Std. Deviation	0,49205530
Most Extreme Differences	Absolute	0,034
	Positive	0,026
	Negative	-0,034
Test Statistic		0,034
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal
- b. Calculated from data
- c. Lilliefors Significance Correction
- d. This is a lower bound of the true significance

Hasil uji normalitas pada Tabel 4.2 terlihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* diperoleh nilai sebesar 0,20. Berdasarkan hasil tersebut nilai signifikansi $0,20 \geq 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai residual pada data yang akan diolah tersebut berdistribusi normal, hal tersebut memenuhi persyaratan uji asumsi klasik untuk uji normalitas. Sehingga data tersebut dapat dilanjutkan untuk proses pengolahan data.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah terdapatnya korelasi atau hubungan antara variabel independen dengan variabel independen yang lain saat dilakukannya pengujian terhadap regresi. Pada penelitian ini, dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Syarat yang harus dipenuhi pada uji multikolinearitas adalah nilai $VIF \leq 10$, dan nilai $Tolerance \geq 0,1$. Jika

persyaratan tersebut terpenuhi, maka antar variabel independen tidak terjadi korelasi.

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kompetensi SDM	0,486	2,059
	Kualitas Informasi	0,981	1,019
	Kompleksitas Pemerintah	0,340	2,940
	Luas Wilayah	0,900	1,111
	Ukuran Pemerintah	0,337	2,967

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.3 terlihat untuk nilai VIF semua variabel independen bernilai ≤ 10 . Untuk nilai *Tolerance* semua variabel bernilai $\geq 0,1$. Rincian kesimpulan dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

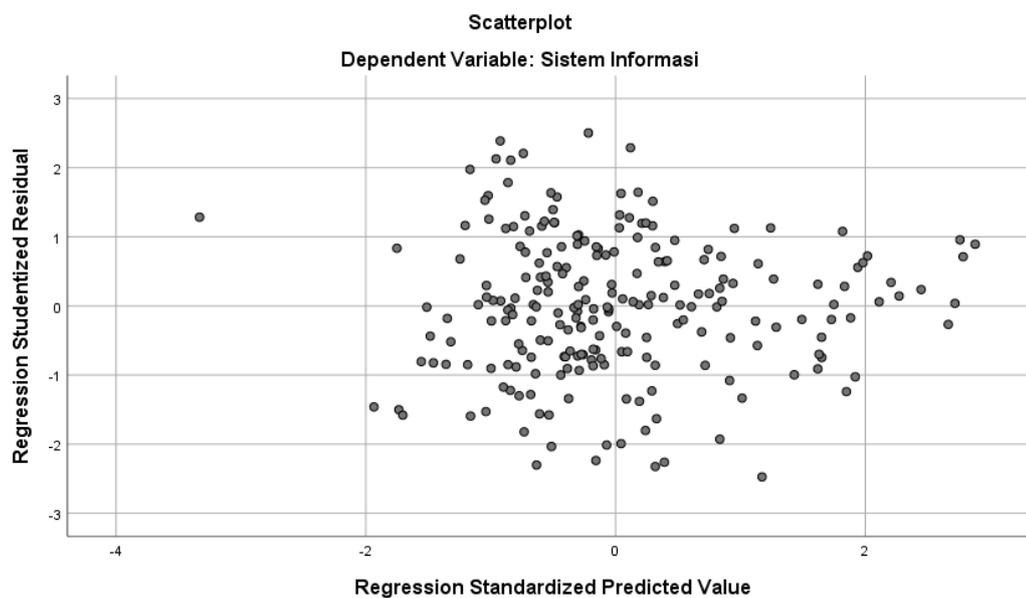
1. Kompetensi SDM dengan nilai VIF $2,059 \leq 10$, dan nilai *Tolerance* $0,486 \geq 0,1$. Dari nilai tersebut kompetensi SDM memenuhi persyaratan uji multikolinearitas.
2. Kualitas informasi dengan nilai VIF $1,019 \leq 10$, dan nilai *Tolerance* $0,981 \geq 0,1$. Dari nilai tersebut kualitas informasi memenuhi persyaratan uji multikolinearitas.
3. Kompleksitas pemerintah dengan nilai VIF $2,940 \leq 10$, dan nilai *Tolerance* $0,340 \geq 0,1$. Dari nilai tersebut kompleksitas pemerintah memenuhi persyaratan uji multikolinearitas.

4. Luas wilayah dengan nilai VIF $1,111 \leq 10$, dan nilai *Tolerance* $0,900 \geq 0,1$. Dari nilai tersebut luas wilayah memenuhi persyaratan uji multikolinearitas.
5. Ukuran pemerintah dengan nilai VIF $2,967 \leq 10$, dan nilai *Tolerance* $0,337 \geq 0,1$. Dari nilai tersebut ukuran pemerintah memenuhi persyaratan uji multikolinearitas.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut, tidak ditemukannya multikolinearitas dari model regresi. Dengan terpenuhinya persyaratan uji multikolinearitas tersebut dapat dilanjutkan untuk pengolahan data berikutnya.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari dilakukannya uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian dari nilai residual antar variabel. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Scatterplot. Dasar pengambilan keputusan diambil berdasarkan pola yang terbentuk, jika pola yang terbentuk bebas tanpa membentuk sebuah pola maka disebut heteroskedastisitas, namun jika hasil uji membentuk sebuah pola maka disebut homoskedastisitas.



Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 4.1 terlihat bahwa pada uji Scatterplot tidak menunjukkan pola tertentu, dan pola yang dihasilkan membentuk pola yang bebas atau acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk uji heteroskedastisitas sebagai persyaratan uji asumsi klasik terpenuhi dan dapat dilanjutkan untuk pengolahan data berikutnya.

4.3 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dengan menggunakan variabel independen berupa kompetensi SDM (X1), kualitas informasi (X2), kompleksitas pemerintah (X3), luas wilayah (X4), dan ukuran pemerintah (X5) dan variabel dependen berupa sistem informasi (Y) sebagai bentuk kematangan dari *e-government*. Hasil analisis yang didapat terdapat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized B
1	(Constant)	-3,409
	Kompetensi SDM	0,036
	Kualitas Informasi	0,242
	Kompleksitas Pemerintah	0,002
	Luas Wilayah	2.493E-5
	Ukuran Pemerintah	0,158

Hasil dari analisis regresi berganda pada Tabel 4.4 tersebut, diperoleh bahwa untuk koefisien dari variabel independen kompetensi SDM (X1) bernilai 0,036; kualitas informasi (X2) bernilai 0,242; kompleksitas pemerintah (X3) bernilai 0,002; luas wilayah (X4) bernilai 2,493E-5; dan ukuran pemerintah (X5) bernilai 0,158 dengan konstanta bernilai -3,409. Dari hasil tersebut model persamaan regresi yang didapat adalah sebagai berikut:

$$Y = -3,409 + 0,036X1 + 0,242X2 + 0,002X3 + 2,493E-5X4 + 0,158X5 + \varepsilon$$

Dari persamaan tersebut menunjukkan mengenai pengaruh dari variabel dependen (Y) atau kematangan *e-government* pemerintah daerah yang dapat dijelaskan oleh koefisien regresi sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai -3,409. Jika variabel independen bernilai 0, maka nilai kematangan *e-government* pada pemerintah daerah sebesar -3,409.
2. Kompetensi SDM X1 bernilai 0,036. Jika nilai X1 ditambahkan 1, maka akan menaikkan nilai Y sebesar 0,036.

3. Kualitas informasi X2 bernilai 0,242. Jika nilai X2 ditambahkan 1, maka akan menaikkan nilai Y sebesar 0,242.
4. Kompleksitas pemerintah X3 bernilai 0,002. Jika nilai X3 ditambahkan 1, maka akan menaikkan nilai Y sebesar 0,002.
5. Luas wilayah X4 bernilai 2,493E-5. Jika nilai X4 ditambahkan 1, maka akan menaikkan nilai Y sebesar 2,493E-5.
6. Ukuran pemerintah X5 bernilai 0,158. Jika nilai X5 ditambahkan 1, maka akan menaikkan nilai Y sebesar 0,158.

4.4 UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Tujuan dari dilakukannya uji koefisien determinasi adalah untuk mengetahui nilai persentase sumbangsih variabel independen berupa kompetensi SDM, kualitas informasi, kompleksitas pemerintah, luas wilayah, dan ukuran pemerintah terhadap kematangan *e-government* pada pemerintahan daerah. Dari uji koefisien determinasi yang dilakukan, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,452	0,204	0,186	0,49767

Dari hasil uji koefisien determinasi tersebut nilai yang didapatkan adalah sebesar 0,186. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa macam – macam perubahan Y yang diberikan oleh variabel independen senilai 18,6%.

Sedangkan untuk 81,4% sisanya diberikan oleh variabel independen lain di luar penelitian ini.

4.5 UJI HIPOTESIS

Tujuan dari dilakukannya uji hipotesis (t) parsial adalah untuk menguji apakah ada pengaruh atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan taraf signifikansi 5% dan 10%. Hasil uji t yang ada pada Tabel 4.6 untuk variabel independen adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hipotesis

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-3,215	0,002
	Kompetensi SDM	3,852	0,000
	Kualitas Informasi	1,951	0,052
	Kompleksitas Pemerintah	0,022	0,983
	Luas Wilayah	1,750	0,081
	Ukuran Pemerintah	1,709	0,089

1. Kompetensi SDM (X1) dari hasil t hitung didapat senilai 3,852 dengan nilai signifikansi senilai $0,000 \leq 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, dapat dijelaskan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah dengan taraf signifikansi 5%.
2. Kualitas informasi (X2) dari hasil t hitung senilai 1,951 dengan nilai signifikansi senilai $0,052 \leq 0,1$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, dapat dijelaskan bahwa kualitas informasi memiliki

pengaruh positif terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah dengan taraf signifikansi 10%.

3. Kompleksitas pemerintah (X3) dari hasil t hitung senilai 0,022 dengan nilai signifikansi senilai $0,983 \geq 0,1$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, dapat dijelaskan bahwa kompleksitas pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah.
4. Luas wilayah (X4) dari hasil t hitung senilai 1,750 dengan nilai signifikansi $0,081 \leq 0,1$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, dapat dijelaskan bahwa luas wilayah memiliki pengaruh positif terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah dengan taraf signifikansi 10%.
5. Ukuran pemerintah (X5) dari hasil t hitung senilai 1,709 dengan nilai signifikansi senilai $0,089 \leq 0,1$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H5 diterima, dapat dijelaskan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kematangan *e-government* pada pemerintah daerah dengan taraf signifikansi 10%.

4.6 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi SDM dengan alat ukur indeks pembangunan manusia, kualitas informasi dengan alat ukur hasil opini audit BPK, luas wilayah dengan alat ukur luas wilayah pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah dengan alat ukur log natural total aset memiliki pengaruh positif terhadap kematangan *e-*

government. Berbeda dengan hasil untuk kompleksitas pemerintah dengan alat ukur log natural jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government* dengan taraf signifikansi 10%. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis dari H1, H2, H4, dan H5 dapat diterima, dan untuk H3 dapat ditolak.

4.6.1 Kompetensi SDM

Berdasarkan dari penjelasan singkat sebelumnya, kompetensi SDM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kematangan *e-government*. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Kumajas (2021) dan Probowulan (2016). Dengan hasil dari penelitian tersebut, maka kompetensi SDM dengan alat ukur indeks pembangunan manusia dapat menjadi faktor yang dapat sangat mempengaruhi kematangan *e-government*, sehingga pemerintah perlu fokus terhadap pengembangan kompetensi SDM yang dimilikinya untuk dapat menambah kualitas dalam meningkatkan kematangan *e-government*.

Implikasi kompetensi SDM bagi pemerintah daerah adalah, dengan SDM yang berkompeten maka akan berpengaruh pada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik dan dapat meningkatkan kematangan *e-government*. Dari kompetensi SDM yang dimiliki oleh suatu pemerintahan menghasilkan sistem – sistem pemerintahan terbaik yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah itu sendiri maupun masyarakatnya. Sehingga dengan kompetensi SDM yang mumpuni dapat memajukan daerah pemerintahan tersebut untuk kesejahteraan

masyarakatnya. Dalam praktiknya kompetensi SDM juga perlu disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang diembannya agar tercapai tujuan organisasi dengan maksimal. Dengan begitu untuk mencapai tujuan akan tingkat kematangan *e-government* pemerintah harus membenahi kompetensi SDM yang dimiliki.

4.6.2 Kualitas Informasi

Berdasarkan dari penjelasan singkat sebelumnya, kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap kematangan *e-government* dengan alat ukur hasil opini audit oleh BPK. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Napitupulu, (2014) bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis & Anggraini, (2020), Oktaviani & Indra Arza, (2020), dan Yustikasari, (2018) bahwa kualitas informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government*. Dari perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan lebih untuk pemerintah dalam meningkatkan kualitas informasinya karena dapat mempengaruhi kematangan *e-government*. Dengan kualitas informasi yang baik maka sistem informasi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan menjadi lebih baik kualitasnya.

4.6.3 Kompleksitas Pemerintah

Berdasarkan dari penjelasan singkat sebelumnya, kompleksitas pemerintah dengan alat ukur log natural jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government*. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Yustikasari, (2018), namun sama dengan hasil penelitian dari

Pradipta & Sofyani, (2021). Dengan demikian kompleksitas pemerintah suatu wilayah tidak dapat mempengaruhi tingkat kematangan *e-government* dengan signifikansi yang rendah. Dari penjelasan tersebut kompleksitas pemerintah tidak dapat memungkinkan menjadi penentu faktor dalam mempengaruhi tingkat kematangan *e-government*, dikarenakan setiap wilayah memiliki karakteristik masing – masing terlepas dari jumlah penduduk pada wilayah tersebut.

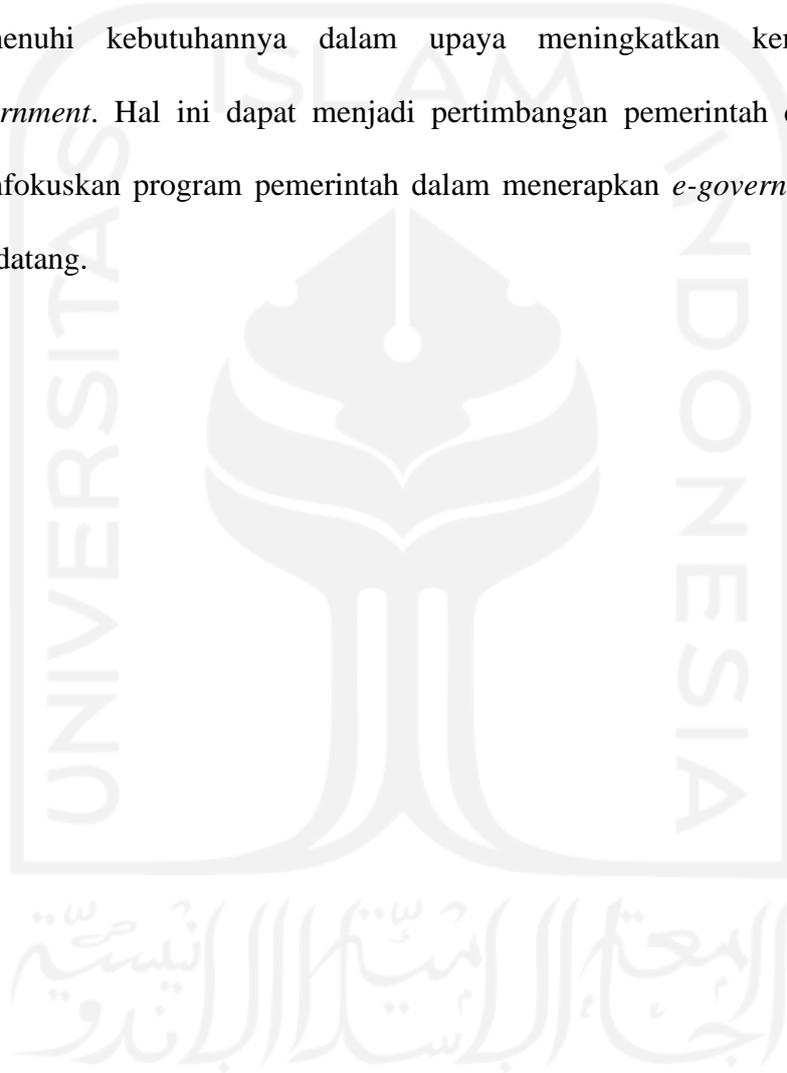
4.6.4 Luas Wilayah

Berdasarkan penjelasan singkat sebelumnya, luas wilayah dengan alat ukur luas wilayah suatu daerah memiliki pengaruh positif terhadap kematangan *e-government*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Moon, (2002), namun berbeda dengan hasil penelitian dari Pradipta & Sofyani, (2021) yang menyatakan bahwa luas wilayah tidak memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government*. Dengan demikian besar kecilnya luas suatu wilayah pemerintahan dapat menjadi penentu dalam mempengaruhi tingkat kematangan *e-government* pada pemerintahan daerah tersebut. Semakin besar luas wilayah maka permasalahan dalam meningkatkan kematangan *e-government* akan semakin kompleks, sehingga pemerintah perlu melakukan manajemen yang baik agar tercapai tujuan suksesnya penerapan *e-government* di setiap tempat pelayanan sektor publik dalam wilayah tersebut.

4.6.5 Ukuran Pemerintah

Berdasarkan penjelasan singkat sebelumnya, ukuran pemerintah dengan alat ukur log natural total aset memiliki pengaruh positif terhadap kematangan

e-government. Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Norris & Moon, (2005). Dengan demikian semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, maka kematangan *e-government* yang ada akan semakin berkualitas dikarenakan pemerintah daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhannya dalam upaya meningkatkan kematangan *e-government*. Hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam memfokuskan program pemerintah dalam menerapkan *e-government* di masa mendatang.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian yang sudah dijelaskan pada BAB IV di atas, dengan tujuan penelitian untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel independen pada penelitian ini terhadap kematangan *e-government*, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kompetensi SDM terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kematangan *e-government* pada pemerintahan daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa.
2. Kualitas Informasi terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kematangan *e-government* pada pemerintahan daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa.
3. Kompleksitas Pemerintah terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kematangan *e-government* pada pemerintahan daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa.
4. Luas Wilayah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kematangan *e-government* pada pemerintahan daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa.
5. Ukuran Pemerintah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kematangan *e-government* pada pemerintahan daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa.

5.2 SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menambah variasi pada variabel independen yang dapat mempengaruhi kematangan *e-government*.
2. Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menggunakan alat ukur yang berbeda pada setiap variabel yang sudah ada pada penelitian ini, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terkait konsistensi hasil penelitian.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kematangan *e-government* sehingga dapat menaikkan kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR REFERENSI

- Andersen, K. V., & Henriksen, H. Z. (2006). E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model. *Government Information Quarterly*, 23(2), 236–248. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.008>
- Banker, R. D., & Patton, J. M. (1987). Analytical agency theory and municipal accounting: An introduction and an application. In *Research in governmental and nonprofit accounting*, 3 (Part B), 29–50 .
- Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. *Academy of Management Journal*. Vol. 34, No. 3, 555–590. <https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/256406>
- Epstein, B. (2022). Two decades of e-government diffusion among local governments in the United States. *Government Information Quarterly*, April, Vol. 39 101665. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101665>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8). In *Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 19
- Glyptis, L., Christofi, M., Vrontis, D., Giudice, M. Del, Dimitriou, S., & Michael, P. (2020). E-Government implementation challenges in small countries: The project manager’s perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 152, 119880. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119880>
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2012/12/instruksi_presiden_no_3_th_20031.pdf
- JabarProv, T. (2019). *Penerapan SPBE di Indonesia masih Belum Merata*. https://jabarprov.go.id/index.php/news/31955/Penerapan_SPBE_di_Indonesia_masih_Belum_Merata#
- Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the corporate boards associated with layoff decisions, firm: managerial behavior, agency costs and Corporate Governance, 14 (2): 75-85 In *Journal of Financial Economics*.
- Jogiyanto, H. M. (2017). Analisis & Desain (*Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*). Yogyakarta: Andi Offset.
- Krishnan, S., Teo, T. S. H., & Lymm, J. (2017). Determinants of electronic participation and electronic government maturity: Insights from cross-country data. *International Journal of Information Management*, 37(4), 297–312. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.03.002>
- Kumajas, Y. N. (2021). The Effects of Human Resources Quality, Infrastructure, Leadership, and Communication on E-Government Implementation: A Case of Indonesia Local Government. *Budapest International Research and*

Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 597–612. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1643>

- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- Liang, Y., Qi, G., Wei, K., & Chen, J. (2017). Exploring the determinant and influence mechanism of e-Government cloud adoption in government agencies in China. *Government Information Quarterly*, 34(3), 481–495. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.06.002>
- Mikalef, P., Lemmer, K., Schaefer, C., Ylinen, M., Fjørtoft, S. O., Torvatn, H. Y., Gupta, M., & Niehaves, B. (2021). Enabling AI capabilities in government agencies: A study of determinants for European municipalities. *Government Information Quarterly*, June. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101596>
- Moon, M. J. (2002). The evolution of E-government among municipalities: Rhetoric or reality? *Public Administration Review*, 62(4), 424–433. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196>
- Muflihah, Y., & Susanto, T. D. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Warga dan Pemerintah dalam Adopsi E-Government: Sebuah Ulasan Sistematis. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(4), 304–310. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201744366>
- Napitupulu, D. (2014). The Critical Success Factors Study for e-Government Implementation. *International Journal of Computer Applications*, 89(16), 23–32. <https://doi.org/10.5120/15716-4588>
- Norris, D. F., & Moon, M. J. (2005). Does managerial orientation matter? The adoption of reinventing government and e-government at the municipal level *. *Information Systems Journal*, 15(1), 43. <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=903466381&Fmt=7&clientId=8991&RQT=309&VName=PQD>
- Nur, E. (2014). Penerapan E-Government Publik Pada Setiap Skpd Berbasis Pelayanan Di Kota Palu. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 18(3), 265–280. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/download/331/267>
- Nurkholis, N., & Anggraini, R. Y. (2020). Determinants of E-Government Implementation Based on Technology Acceptance Model. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 11(2), 184–197. <https://doi.org/10.15294/jdm.v11i2.23853>
- Oktaviani, S., & Indra Arza, F. (2020). Pengaruh Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3312–3326. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.284>
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Mengenai Sistem Pemerintahan

- Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Mengenai Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53673/pp-no-101-tahun-2000>
- Pradipta, R., & Sofyani, H. (2021). *Faktor-aktor yang berhubungan dengan tingkat pelaksanaan e-government di pemerintah daerah*. 3, 185–204.
<http://dx.doi.org/10.30596%2Fjakk.v4i2.7756>
- Probowulan, D. (2016). (Artikel) Dampak Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan E-Government Sebagai Bentuk Pelayanan Publik. *Balance*. Vol. 13, No. 1.
<http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/4361>
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Mengenai Administrasi Kependudukan
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202>
- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Mengenai Penataan Ruang
[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007#:~:text=Undang%2Dundang%20\(UU\)%20ini,3501\)%20dan%20dinyat akan%20tidak%20berlaku](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007#:~:text=Undang%2Dundang%20(UU)%20ini,3501)%20dan%20dinyat akan%20tidak%20berlaku).
- Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Mengenai Administrasi Pemerintahan
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Weerakkody, V., El-Haddadeh, R., Sabol, T., Ghoneim, A., & Dzupka, P. (2012). E-government implementation strategies in developed and transition economies: A comparative study. *International Journal of Information Management*, 32(1), 66–74. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2011.10.005>
- World Bank. (2015). *What is e-Government?*
<https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government>
- Yustikasari, Y. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se – Indonesia). In *Jurnal Profita* (Vol. 11, Issue 1, p. 34). Universitas Mercu Buana. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.01.003>

LAMPIRAN 1

DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No	Nama Daerah	2018	2019
1	Bandung	2,72	2,85
2	Bandung Barat	2,54	2,41
3	Bekasi	2,27	2,17
4	Bogor	2,58	2,58
5	Ciamis	1,44	2,35
6	Cianjur	2,19	2,75
7	Cirebon	2,63	2,89
8	Garut	2,04	2,61
9	Indramayu	1,65	2,7
10	Karawang	2,22	3,39
11	Kuningan	2,25	2,11
12	Majalengka	2,3	2,19
13	Pangandaran	1,5	2,37
14	Purwakarta	3	3,14
15	Subang	2,03	3,01
16	Sukabumi	2,54	2,31
17	Sumedang	2,46	2,51
18	Tasikmalaya	1,42	1,28
19	Bandung	3,11	3,72
20	Bekasi	2,43	3,43
21	Bogor	2,91	2,97
22	Cimahi	3,07	3,16
23	Cirebon	2,26	2,27
24	Depok	2,62	3,17
25	Sukabumi	2,33	2,48
26	Tasikmalaya	2,16	2,13
27	Banjarnegara	1,74	1,93
28	Banyumas	2,63	2,65
29	Batang	3,39	3,41
30	Blora	2,07	2,65
31	Boyolali	2,72	2,85
32	Brebes	1,39	2,81
33	Cilacap	2,14	2,43
34	Demak	2,96	3,74
35	Grobogan	2,11	3
36	Jepara	2,64	2,41

37	Karanganyar	2,04	2,99
38	Kebumen	2,11	2,64
39	Kendal	2,94	3,76
40	Klaten	2,23	3
41	Kudus	2,72	2,73
42	Magelang	2,18	2,74
43	Pati	2,27	3,22
44	Pekalongan	1,49	3,04
45	Pemalang	3,11	2,91
46	Purbalingga	1,94	3,04
47	Purworejo	2,04	2,96
48	Rembang	2,35	2,78
49	Semarang	2,66	3,02
50	Sragen	2,75	2,75
51	Sukoharjo	2,77	3,54
52	Tegal	2,58	2,82
53	Temanggung	1,77	2,82
54	Wonogiri	1,97	2,51
55	Wonosobo	2,94	2,94
56	Magelang	2,34	2,77
57	Pekalongan	2,95	3,14
58	Salatiga	1,66	3,08
59	Semarang	3,27	3,3
60	Surakarta	2,53	3,33
61	Tegal	2,33	2,54
62	Bantul	1,84	3,36
63	Gunungkidul	2,73	3,24
64	Kulonprogo	2,69	2,92
65	Sleman	3,13	2,91
66	Yogyakarta	2,96	3,37
67	Banghalan	1,99	1,82
68	Banyuwangi	3,43	3,22
69	Blitar	2,14	2,9
70	Bojonegoro	2,52	2,97
71	Bondowoso	1,86	2,38
72	Gresik	2,56	3,14
73	Jember	1,8	2,18
74	Jombang	1,43	1,6
75	Kediri	1,56	2,4
76	Lamongan	3,11	3,4

77	Lumajang	1,99	2,6
78	Madiun	2,1	2,55
79	Magetan	1,82	2,56
80	Malang	1,94	1,85
81	Mojokerto	1,74	1,55
82	Nganjuk	2,16	2,22
83	Ngawi	2,16	2,98
84	Pacitan	1,56	1,77
85	Pamekasan	2,31	2,22
86	Pasuruan	2,42	3,05
87	Ponorogo	1,66	3,05
88	Probolinggo	2,15	2,85
89	Sampang	1,38	1,81
90	Sidoarjo	2,55	3,13
91	Situbondo	3,24	3,48
92	Sumenep	1,88	1,94
93	Trenggalek	1,76	2,6
94	Tuban	2,36	2,17
95	Tulungagung	2,46	2,64
96	Batu	2,43	2,66
97	Blitar	1,52	2,71
98	Kediri	2,84	2,61
99	Madiun	3,16	2,82
100	Malang	2,44	2,85
101	Mojokerto	1,94	3,22
102	Pasuruan	2,38	2,31
103	Probolinggo	2,53	3,25
104	Surabaya	3,61	3,72
105	Lebak	2,94	3,52
106	Pandeglang	3,26	3,07
107	Serang	2,33	2,43
108	Tangerang	3,08	2,98
109	Cilegon	3,23	3,23
110	Serang	2,41	2,41
111	Tangerang	3,16	3,44
112	Tangerang Selatan	3,29	3,21

LAMPIRAN 2

DATA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

No	Nama Daerah	2018	2019
1	Bandung	71,75	72,41
2	Bandung Barat	67,46	68,27
3	Bekasi	73,49	73,99
4	Bogor	69,69	70,65
5	Ciamis	69,63	70,39
6	Cianjur	64,62	65,38
7	Cirebon	68,05	68,69
8	Garut	65,42	66,22
9	Indramayu	66,36	66,97
10	Karawang	69,89	70,86
11	Kuningan	68,55	69,12
12	Majalengka	66,72	67,52
13	Pangandaran	67,44	68,21
14	Purwakarta	69,98	70,67
15	Subang	68,31	68,69
16	Sukabumi	66,05	66,87
17	Sumedang	70,99	71,46
18	Tasikmalaya	65	65,64
19	Bandung	81,06	81,62
20	Bekasi	81,04	81,59
21	Bogor	75,66	76,23
22	Cimahi	77,56	78,11
23	Cirebon	74,35	74,92
24	Depok	80,29	80,82
25	Sukabumi	73,55	74,31
26	Tasikmalaya	72,03	72,84
27	Banjarnegara	66,54	67,34
28	Banyumas	71,3	71,96
29	Batang	67,86	68,42
30	Blora	67,95	68,65
31	Boyolali	73,22	73,8
32	Brebes	65,68	66,12
33	Cilacap	69,56	69,98
34	Demak	71,26	71,87
35	Grobogan	69,32	69,86
36	Jepara	71,38	71,88

37	Karanganyar	75,54	75,89
38	Kebumen	68,8	69,6
39	Kendal	71,28	71,97
40	Klaten	74,79	75,29
41	Kudus	74,58	74,94
42	Magelang	69,11	69,87
43	Pati	70,71	71,35
44	Pekalongan	68,97	69,71
45	Pemalang	65,67	66,32
46	Purbalingga	68,41	68,99
47	Purworejo	71,87	72,5
48	Rembang	69,46	70,15
49	Semarang	73,61	74,14
50	Sragen	72,96	73,43
51	Sukoharjo	76,07	76,84
52	Tegal	67,33	68,24
53	Temanggung	68,83	69,56
54	Wonogiri	69,37	69,98
55	Wonosobo	67,81	68,27
56	Magelang	78,31	78,8
57	Pekalongan	74,24	74,77
58	Salatiga	82,41	83,12
59	Semarang	82,72	83,19
60	Surakarta	81,46	81,86
61	Tegal	74,44	74,93
62	Bantul	79,45	80,01
63	Gunungkidul	69,24	69,96
64	Kulonprogo	73,76	74,44
65	Sleman	83,42	83,85
66	Yogyakarta	86,11	86,65
67	Banghalan	62,87	63,79
68	Banyuwangi	70,06	70,6
69	Blitar	69,93	70,57
70	Bojonegoro	67,85	68,75
71	Bondowoso	65,27	66,09
72	Gresik	75,28	76,1
73	Jember	65,96	66,69
74	Jombang	71,86	72,85
75	Kediri	71,07	71,85
76	Lamongan	71,97	72,57

77	Lumajang	64,83	65,33
78	Madiun	71,01	71,69
79	Magetan	72,91	73,49
80	Malang	69,4	70,35
81	Mojokerto	72,64	73,53
82	Nganjuk	71,23	71,71
83	Ngawi	69,91	70,41
84	Pacitan	67,33	68,16
85	Pamekasan	65,41	65,94
86	Pasuruan	67,41	68,29
87	Ponorogo	69,91	70,56
88	Probolinggo	64,85	65,6
89	Sampang	61	61,94
90	Sidoarjo	79,5	80,05
91	Situbondo	66,42	67,09
92	Sumenep	65,25	66,22
93	Trenggalek	68,71	69,46
94	Tuban	67,43	68,37
95	Tulungagung	71,99	72,62
96	Batu	75,04	75,88
97	Blitar	77,58	78,56
98	Kediri	77,58	78,08
99	Madiun	80,33	80,88
100	Malang	80,89	81,32
101	Mojokerto	77,14	77,96
102	Pasuruan	74,78	75,25
103	Probolinggo	72,53	73,27
104	Surabaya	81,74	82,22
105	Lebak	63,37	63,88
106	Pandeglang	64,34	64,91
107	Serang	65,93	66,38
108	Tangerang	71,59	71,93
109	Cilegon	72,65	73,01
110	Serang	71,68	72,1
111	Tangerang	77,92	78,43
112	Tangerang Selatan	81,17	81,48

LAMPIRAN 3

DATA HASIL OPINI AUDIT OLEH BPK

No	Nama Daerah	2018	2019
1	Bandung	4	4
2	Bandung Barat	3	4
3	Bekasi	4	4
4	Bogor	4	4
5	Ciamis	4	4
6	Cianjur	3	4
7	Cirebon	4	4
8	Garut	4	4
9	Indramayu	4	4
10	Karawang	4	4
11	Kuningan	4	4
12	Majalengka	4	4
13	Pangandaran	4	4
14	Purwakarta	4	4
15	Subang	4	4
16	Sukabumi	4	4
17	Sumedang	4	4
18	Tasikmalaya	3	4
19	Bandung	4	4
20	Bekasi	4	4
21	Bogor	4	4
22	Cimahi	4	4
23	Cirebon	4	4
24	Depok	4	4
25	Sukabumi	4	4
26	Tasikmalaya	4	4
27	Banjarnegara	4	4
28	Banyumas	4	4
29	Batang	4	4
30	Blora	4	4
31	Boyolali	4	4
32	Brebes	3	4
33	Cilacap	4	4
34	Demak	4	4

35	Grobogan	4	4
36	Jepara	4	4
37	Karanganyar	4	4
38	Kebumen	4	4
39	Kendal	4	4
40	Klaten	4	4
41	Kudus	4	4
42	Magelang	4	4
43	Pati	4	4
44	Pekalongan	4	4
45	Pemalang	4	4
46	Purbalingga	4	4
47	Purworejo	4	4
48	Rembang	4	4
49	Semarang	4	4
50	Sragen	4	4
51	Sukoharjo	4	4
52	Tegal	4	4
53	Temanggung	4	4
54	Wonogiri	4	4
55	Wonosobo	4	4
56	Magelang	4	4
57	Pekalongan	4	4
58	Salatiga	4	4
59	Semarang	4	4
60	Surakarta	4	4
61	Tegal	4	4
62	Bantul	4	4
63	Gunungkidul	4	4
64	Kulonprogo	4	4
65	Sleman	4	4
66	Yogyakarta	4	4
67	Banghalan	4	4
68	Banyuwangi	4	4
69	Blitar	4	4
70	Bojonegoro	4	4
71	Bondowoso	4	4

72	Gresik	4	4
73	Jember	3	1
74	Jombang	4	4
75	Kediri	4	4
76	Lamongan	4	4
77	Lumajang	4	4
78	Madiun	4	4
79	Magetan	4	4
80	Malang	4	4
81	Mojokerto	4	4
82	Nganjuk	4	4
83	Ngawi	4	4
84	Pacitan	4	4
85	Pamekasan	4	4
86	Pasuruan	4	4
87	Ponorogo	4	4
88	Probolinggo	4	4
89	Sampang	4	4
90	Sidoarjo	4	4
91	Situbondo	4	4
92	Sumenep	4	4
93	Trenggalek	4	4
94	Tuban	4	4
95	Tulungagung	3	4
96	Batu	4	4
97	Blitar	4	4
98	Kediri	4	4
99	Madiun	4	4
100	Malang	4	4
101	Mojokerto	4	4
102	Pasuruan	3	3
103	Probolinggo	4	4
104	Surabaya	4	4
105	Lebak	4	4
106	Pandeglang	4	4
107	Serang	4	4
108	Tangerang	4	4

109	Cilegon	4	4
110	Serang	4	4
111	Tangerang	4	4
112	Tangerang Selatan	4	4



LAMPIRAN 4

DATA JUMLAH PENDUDUK (Dalam *Logistic Natural*)

No	Nama Daerah	2018	2019
1	Bandung	15,07475	15,07475
2	Bandung Barat	14,29559	14,29559
3	Bekasi	14,75332	14,75332
4	Bogor	15,26156	15,26156
5	Ciamis	14,02114	14,02114
6	Cianjur	14,62496	14,62496
7	Cirebon	14,55701	14,55701
8	Garut	14,60851	14,60851
9	Indramayu	14,4281	14,4281
10	Karawang	14,56242	14,56242
11	Kuningan	13,94004	13,94004
12	Majalengka	14,05215	14,05215
13	Pangandaran	12,91632	12,91632
14	Purwakarta	13,72417	13,72417
15	Subang	14,25565	14,25565
16	Sukabumi	14,74135	14,74135
17	Sumedang	13,94286	13,94286
18	Tasikmalaya	14,35415	14,35415
19	Bandung	14,69289	14,69289
20	Bekasi	14,69476	14,69476
21	Bogor	13,82051	13,82051
22	Cimahi	13,18625	13,18625
23	Cirebon	12,69394	12,69394
24	Depok	14,40835	14,40835
25	Sukabumi	12,719	12,719
26	Tasikmalaya	13,44816	13,44816
27	Banjarnegara	13,81791	13,81791
28	Banyumas	14,37001	14,37001
29	Batang	13,55821	13,55821
30	Blora	13,70339	13,70339
31	Boyolali	13,80523	13,80523
32	Brebes	14,45539	14,45539
33	Cilacap	14,4256	14,4256
34	Demak	13,92557	13,92557

35	Grobogan	14,18606	14,18606
36	Jepara	13,96236	13,96236
37	Karanganyar	13,7068	13,7068
38	Kebumen	14,12485	14,12485
39	Kendal	13,79201	13,79201
40	Klaten	14,08134	14,08134
41	Kudus	13,63241	13,63241
42	Magelang	14,0629	14,0629
43	Pati	14,16637	14,16637
44	Pekalongan	13,74823	13,74823
45	Pemalang	14,20157	14,20157
46	Purbalingga	13,76769	13,76769
47	Purworejo	13,55571	13,55571
48	Rembang	13,34709	13,34709
49	Semarang	13,82412	13,82412
50	Sragen	13,79675	13,79675
51	Sukoharjo	13,70714	13,70714
52	Tegal	14,18298	14,18298
53	Temanggung	13,55394	13,55394
54	Wonogiri	13,89344	13,89344
55	Wonosobo	13,66268	13,66268
56	Magelang	11,76991	11,76991
57	Pekalongan	12,62824	12,62824
58	Salatiga	12,13811	12,13811
59	Semarang	14,31812	14,31812
60	Surakarta	13,23974	13,23974
61	Tegal	12,5459	12,5459
62	Bantul	13,72285	13,72285
63	Gunungkidul	13,52532	13,52532
64	Kulonprogo	13,06159	13,06159
65	Sleman	13,90454	13,90454
66	Yogyakarta	13,36399	13,36399
67	Bangkalán	13,87907	13,87907
68	Banyuwangi	14,34238	14,34238
69	Blitar	14,01362	14,01362
70	Bojonegoro	14,08837	14,08837
71	Bondowoso	13,56929	13,56929

72	Gresik	14,04006	14,04006
73	Jember	14,77961	14,77961
74	Jombang	14,07476	14,07476
75	Kediri	14,26758	14,26758
76	Lamongan	14,12135	14,12135
77	Lumajang	13,91812	13,91812
78	Madiun	13,49805	13,49805
79	Magetan	13,44017	13,44017
80	Malang	14,71745	14,71745
81	Mojokerto	13,91454	13,91454
82	Nganjuk	13,90804	13,90804
83	Ngawi	13,70959	13,70959
84	Pacitan	13,2747	13,2747
85	Pamekasan	13,60643	13,60643
86	Pasuruan	14,26862	14,26862
87	Ponorogo	13,76346	13,76346
88	Probolinggo	13,91394	13,91394
89	Sampang	13,64694	13,64694
90	Sidoarjo	14,41822	14,41822
91	Situbondo	13,43173	13,43173
92	Sumenep	13,93482	13,93482
93	Trenggalek	13,50984	13,50984
94	Tuban	13,98934	13,98934
95	Tulungagung	13,90951	13,90951
96	Batu	12,22201	12,22201
97	Blitar	11,94588	11,94588
98	Kediri	12,56908	12,56908
99	Madiun	12,22814	12,22814
100	Malang	13,63464	13,63464
101	Mojokerto	11,82469	11,82469
102	Pasuruan	12,25059	12,25059
103	Probolinggo	12,35661	12,35661
104	Surabaya	14,85504	14,85504
105	Lebak	14,01621	14,01621
106	Pandeglang	13,9769	13,9769
107	Serang	14,17668	14,17668
108	Tangerang	14,77861	14,77861

109	Cilegon	12,91022	12,91022
110	Serang	13,35398	13,35398
111	Tangerang	14,31715	14,31715
112	Tangerang Selatan	14,03401	14,03401



LAMPIRAN 5
DATA LUAS WILAYAH

No	Nama Daerah	2018	2019
1	Bandung	1.767,96	1.767,96
2	Bandung Barat	1.305,77	1.305,77
3	Bekasi	1.224,88	1.224,88
4	Bogor	2.710,62	2.710,62
5	Ciamis	1.414,71	1.414,71
6	Cianjur	3.840,16	3.840,16
7	Cirebon	984,52	984,52
8	Garut	3.074,07	3.074,07
9	Indramayu	2.040,11	2.040,11
10	Karawang	1.652,20	1.652,20
11	Kuningan	1.110,56	1.110,56
12	Majalengka	1.204,24	1.204,24
13	Pangandaran	1.010,00	1.010,00
14	Purwakarta	825,74	825,74
15	Subang	1.893,95	1.893,95
16	Sukabumi	4.145,70	4.145,70
17	Sumedang	1.518,33	1.518,33
18	Tasikmalaya	2.551,19	2.551,19
19	Bandung	167,67	167,67
20	Bekasi	206,61	206,61
21	Bogor	118,5	118,5
22	Cimahi	39,27	39,27
23	Cirebon	37,36	37,36
24	Depok	200,29	200,29
25	Sukabumi	48,25	48,25
26	Tasikmalaya	171,61	171,61
27	Banjarnegara	1.023,73	1.023,73
28	Banyumas	1.335,30	1.335,30
29	Batang	788,65	788,65
30	Blora	1.804,59	1.804,59
31	Boyolali	1.008,45	1.008,45
32	Brebes	1.902,37	1.902,37
33	Cilacap	2.124,47	2.124,47
34	Demak	900,12	900,12

35	Grobogan	2.013,86	2.013,86
36	Jepara	1.059,25	1.059,25
37	Karanganyar	775,44	775,44
38	Kebumen	1.211,74	1.211,74
39	Kendal	1.118,13	1.118,13
40	Klaten	658,22	658,22
41	Kudus	425,15	425,15
42	Magelang	1.102,93	1.102,93
43	Pati	1.489,19	1.489,19
44	Pekalongan	837	837
45	Pemalang	1.118,03	1.118,03
46	Purbalingga	677,55	677,55
47	Purworejo	1.091,49	1.091,49
48	Rembang	887,13	887,13
49	Semarang	14.895,00	14.895,00
50	Sragen	12.391,00	12.391,00
51	Sukoharjo	11.100,00	11.100,00
52	Tegal	14.528,00	14.528,00
53	Temanggung	837,71	837,71
54	Wonogiri	1.793,67	1.793,67
55	Wonosobo	981,41	981,41
56	Magelang	16,06	16,06
57	Pekalongan	45,25	45,25
58	Salatiga	57,36	57,36
59	Semarang	373,78	373,78
60	Surakarta	46,01	46,01
61	Tegal	39,68	39,68
62	Bantul	506,86	506,86
63	Gunungkidul	1.485,36	1.485,36
64	Kulonprogo	586,27	586,27
65	Sleman	574,82	574,82
66	Yogyakarta	32,5	32,5
67	Bangkalán	1.001,44	1.001,44
68	Banyuwangi	5.782,40	5.782,40
69	Blitar	1.336,48	1.336,48
70	Bojonegoro	2.198,79	2.198,79
71	Bondowoso	1.525,97	1.525,97

72	Gresik	1.191,25	1.191,25
73	Jember	3.092,34	3.092,34
74	Jombang	1.115,09	1.115,09
75	Kediri	1.386,05	1.386,05
76	Lamongan	1.782,05	1.782,05
77	Lumajang	1.790,90	1.790,90
78	Madiun	1.037,58	1.037,58
79	Magetan	688,84	688,84
80	Malang	3.530,65	3.530,65
81	Mojokerto	717,83	717,83
82	Nganjuk	1.224,25	1.224,25
83	Ngawi	1.295,98	1.295,98
84	Pacitan	1.389,92	1.389,92
85	Pamekasan	792,24	792,24
86	Pasuruan	1.474,02	1.474,02
87	Ponorogo	1.305,70	1.305,70
88	Probolinggo	1.696,21	1.696,21
89	Sampang	1.233,08	1.233,08
90	Sidoarjo	634,38	634,38
91	Situbondo	1.669,87	1.669,87
92	Sumenep	1.998,54	1.998,54
93	Trenggalek	1.147,22	1.147,22
94	Tuban	1.834,15	1.834,15
95	Tulungagung	1.055,65	1.055,65
96	Batu	136,74	136,74
97	Blitar	32,57	32,57
98	Kediri	63,4	63,4
99	Madiun	33,29	33,29
100	Malang	145,28	145,28
101	Mojokerto	16,47	16,47
102	Pasuruan	35,29	35,29
103	Probolinggo	56,67	56,67
104	Surabaya	350,54	350,54
105	Lebak	3.426,56	3.426,56
106	Pandeglang	2.746,89	2.746,89
107	Serang	1.734,28	1.734,28
108	Tangerang	1.011,86	1.011,86

109	Cilegon	175,5	175,5
110	Serang	266,71	266,71
111	Tangerang	153,93	153,93
112	Tangerang Selatan	147,19	147,19



LAMPIRAN 6

DATA TOTAL ASET (Dalam Logistic Natural)

No	Nama Daerah	2018	2019
1	Bandung	16,16014	16,23712
2	Bandung Barat	15,0148	15,06307
3	Bekasi	16,34019	16,38597
4	Bogor	16,96694	17,09238
5	Ciamis	14,93464	15,13782
6	Cianjur	15,62983	15,69126
7	Cirebon	15,21398	15,33601
8	Garut	15,35928	15,38974
9	Indramayu	15,41752	15,57264
10	Karawang	15,39097	15,49342
11	Kuningan	14,64741	14,68407
12	Majalengka	15,3705	15,40109
13	Pangandaran	14,48048	14,59141
14	Purwakarta	14,82921	14,81558
15	Subang	15,35548	15,41185
16	Sukabumi	15,25958	15,32773
17	Sumedang	14,94186	15,03953
18	Tasikmalaya	15,39721	15,46251
19	Bandung	17,56773	17,58886
20	Bekasi	16,27574	16,41856
21	Bogor	15,91156	15,94978
22	Cimahi	14,68648	14,80819
23	Cirebon	14,99093	15,17854
24	Depok	16,137	16,30597
25	Sukabumi	14,38887	14,39532
26	Tasikmalaya	14,99476	15,08081
27	Banjarnegara	15,28701	15,31276
28	Banyumas	15,67491	15,64435
29	Batang	14,73649	14,79548
30	Blora	14,88602	15,02821
31	Boyolali	14,95209	15,14262
32	Brebes	15,0295	15,24761
33	Cilacap	15,33949	15,56211
34	Demak	15,44174	15,51121

35	Grobogan	15,06964	15,10827
36	Jepara	15,62907	15,6868
37	Karanganyar	14,97582	15,06166
38	Kebumen	15,33035	15,31565
39	Kendal	14,94085	14,92305
40	Klaten	15,20214	15,2404
41	Kudus	15,24084	15,31257
42	Magelang	14,96029	15,00049
43	Pati	15,63859	15,678
44	Pekalongan	14,832	14,92099
45	Pemalang	15,07184	15,14707
46	Purbalingga	14,77942	14,86154
47	Purworejo	14,83543	14,90986
48	Rembang	14,5495	14,57773
49	Semarang	15,29285	15,3609
50	Sragen	15,03182	15,18716
51	Sukoharjo	15,37116	15,46314
52	Tegal	14,97371	15,03267
53	Temanggung	14,94844	14,99111
54	Wonogiri	15,05153	15,1347
55	Wonosobo	14,93721	15,0365
56	Magelang	15,16758	15,205
57	Pekalongan	14,71691	14,86517
58	Salatiga	14,951	14,93789
59	Semarang	17,24856	16,7147
60	Surakarta	15,86108	16,27673
61	Tegal	14,69222	14,69829
62	Bantul	14,99571	15,05285
63	Gunungkidul	14,86155	14,92449
64	Kulonprogo	14,55306	14,67908
65	Sleman	15,32797	15,40264
66	Yogyakarta	15,22698	15,2617
67	Bangkalan	14,99233	14,9847
68	Banyuwangi	15,2397	15,30015
69	Blitar	15,21161	15,30803
70	Bojonegoro	15,93378	16,3611
71	Bondowoso	14,84534	14,89943

72	Gresik	15,59548	15,65703
73	Jember	15,37404	15,46874
74	Jombang	15,04051	15,13525
75	Kediri	15,30944	15,37445
76	Lamongan	15,43665	15,49443
77	Lumajang	14,68486	14,68848
78	Madiun	15,21532	15,24171
79	Magetan	14,53221	14,61749
80	Malang	15,75684	15,7593
81	Mojokerto	15,55623	15,59486
82	Nganjuk	14,98213	15,02487
83	Ngawi	15,12896	15,20215
84	Pacitan	14,63526	14,66957
85	Pamekasan	15,06358	15,11021
86	Pasuruan	15,19362	15,26408
87	Ponorogo	14,8595	14,77818
88	Probolinggo	14,65102	14,70804
89	Sampang	15,03268	15,20816
90	Sidoarjo	16,67068	16,85021
91	Situbondo	15,07425	15,11832
92	Sumenep	15,06704	15,16561
93	Trenggalek	14,66862	14,69602
94	Tuban	15,73702	15,7814
95	Tulungagung	15,16975	15,21919
96	Batu	14,46303	14,51361
97	Blitar	14,69573	14,78808
98	Kediri	14,93046	14,9268
99	Madiun	14,74296	14,79336
100	Malang	15,67127	15,67052
101	Mojokerto	14,43314	14,49506
102	Pasuruan	14,90064	14,94609
103	Probolinggo	14,33536	14,33955
104	Surabaya	17,57122	17,61534
105	Lebak	15,2364	15,26616
106	Pandeglang	14,88726	14,94712
107	Serang	15,16566	15,15507
108	Tangerang	16,47968	16,64664

109	Cilegon	15,32413	15,36627
110	Serang	14,74405	14,8771
111	Tangerang	15,87535	15,91905
112	Tangerang Selatan	16,82901	16,86176



LAMPIRAN 7

HASIL UJI ANALISIS

1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi SDM	224	25.65	61.00	86.65	71.8858	5.17940
Kualitas Informasi	224	3.00	1.00	4.00	3.9509	.27168
Kompleksitas Pemerintah	224	3.4916464	11.7699138	15.2615602	13.78941080	.7017298627
Luas Wilayah	224	14878.94	16.06	14895.00	1592.5879	2466.50300
Ukuran Pemerintah	224	3.2799799	14.3353621	17.6153421	15.28616224	.6225765462
Sistem Informasi	224	2.48	1.28	3.76	2.5750	.55151
Valid N (listwise)	224					

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

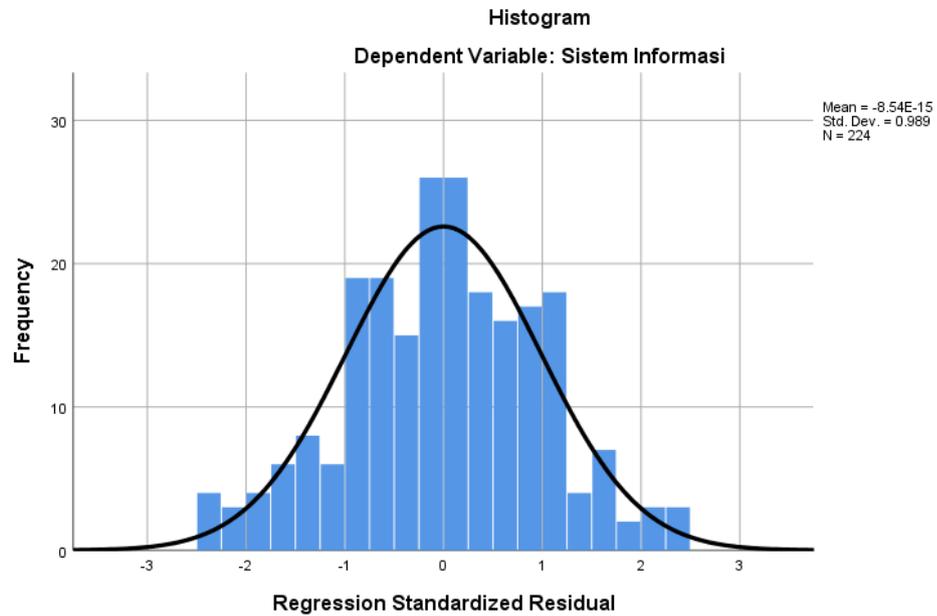
		Unstandardized Residual
N		224
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.49205530
Most Extreme Differences	Absolute	.034
	Positive	.026
	Negative	-.034
Test Statistic		.034
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



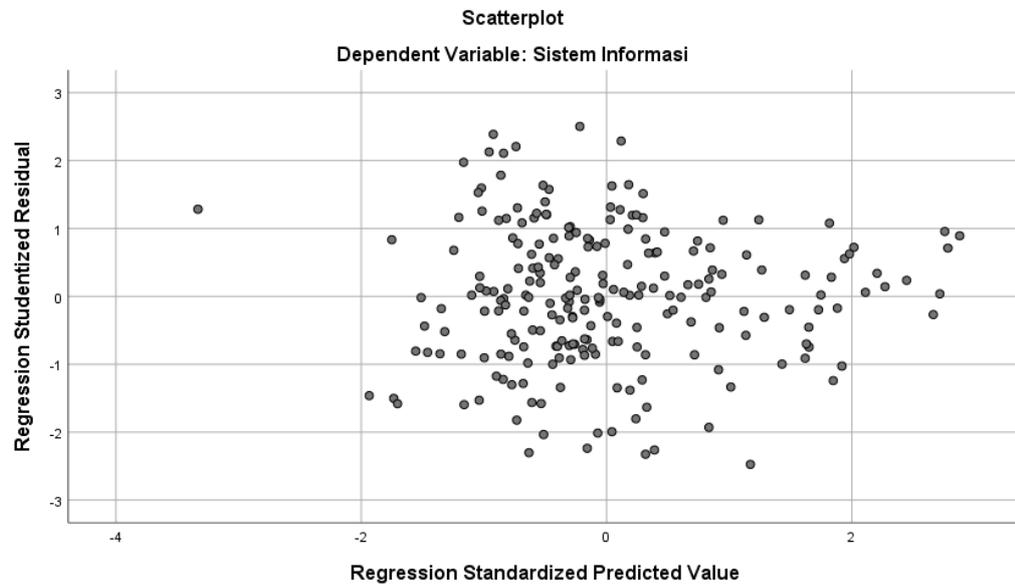
3. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3.409	1.060		-3.215	.002		
	Kompetensi SDM	.036	.009	.334	3.852	.000	.486	2.059
	Kualitas Informasi	.242	.124	.119	1.951	.052	.981	1.019
	Kompleksitas Pemerintah	.002	.081	.002	.022	.983	.340	2.940
	Luas Wilayah	2.493E-5	.000	.111	1.750	.081	.900	1.111
	Ukuran Pemerintah	.158	.092	.178	1.709	.089	.337	2.967

a. Dependent Variable: Sistem Informasi

4. Uji Heteroskedastisitas



5. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.409	1.060		-3.215	.002
	Kompetensi SDM	.036	.009	.334	3.852	.000
	Kualitas Informasi	.242	.124	.119	1.951	.052
	Kompleksitas Pemerintah	.002	.081	.002	.022	.983
	Luas Wilayah	2.493E-5	.000	.111	1.750	.081
	Ukuran Pemerintah	.158	.092	.178	1.709	.089

a. Dependent Variable: Sistem Informasi

6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.452 ^a	.204	.186	.49767

a. Predictors: (Constant), Ukuran Pemerintah, Luas Wilayah, Kualitas Informasi, Kompetensi SDM, Kompleksitas Pemerintah

b. Dependent Variable: Sistem Informasi